

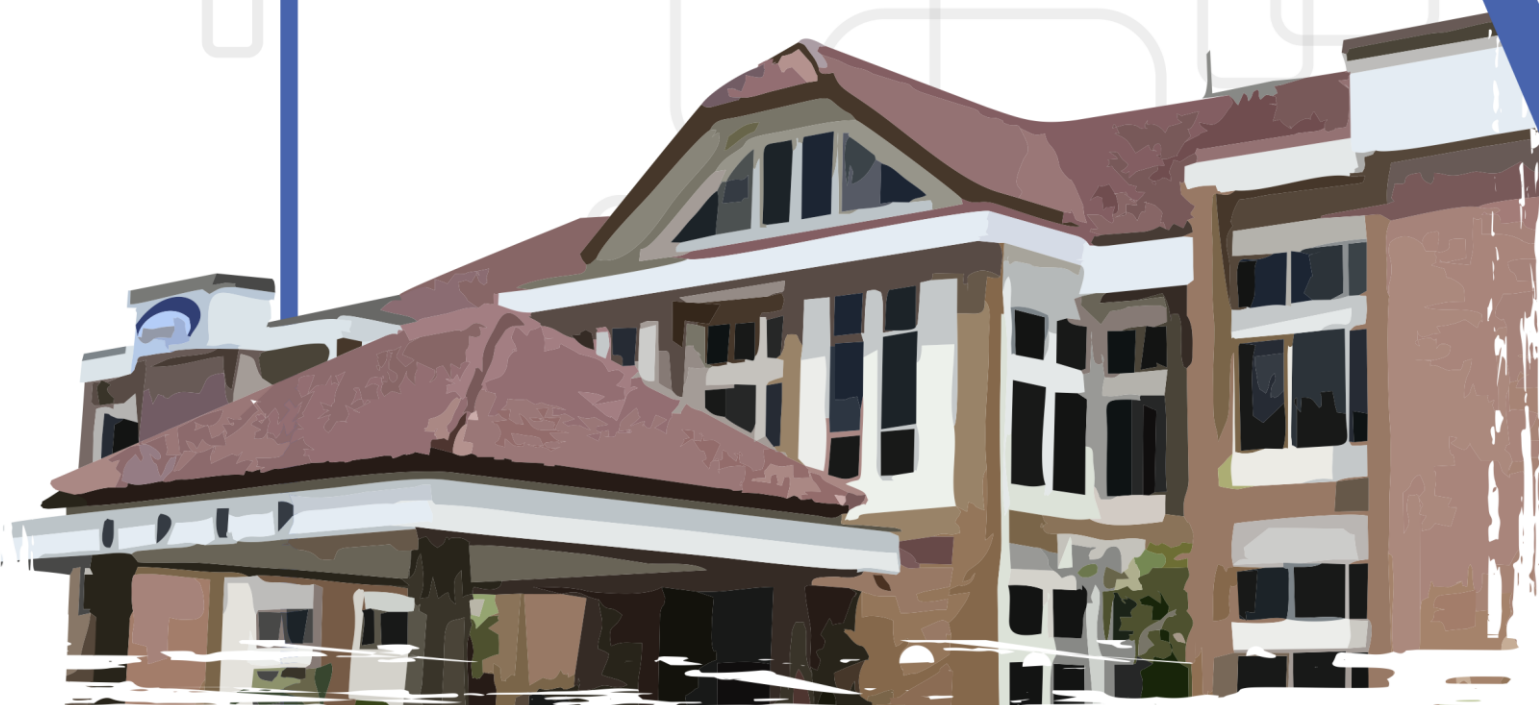


LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2021

LKJ-4/PW16/6/2022
05 JANUARI 2022



KATA PENGANTAR



Laporan kinerja ini menginformasikan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, sebagai bagian dari tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2024.

Laporan ini merupakan wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan kepada mitra kerja dan masyarakat dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memuat analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, yang diarahkan untuk mengetahui hambatan dan peluang dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hal ini digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja di lingkungan BPKP sedang melakukan transformasi pengawasan dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional dan daerah di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara umum, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah

mencapai target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Namun demikian, beberapa indikator memerlukan usaha yang lebih gigih untuk mencapainya.

Capain kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bukti komitmen dan dukungan aktif dari seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan kerja sama yang baik dengan seluruh mitra kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kami terus memiliki komitmen yang tinggi agar selalu Hadir dan Bermanfaat bagi mitra kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan.

Banjarmaru, 5 Januari 2022

Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan,

Rudy M Harahap

DAFTAR ISI

VI

RINGKASAN EKSEKUTIF

1

BAB I PENDAHULUAN

- 2 TUGAS DAN FUNGSI
- 4 STRUKTUR ORGANISASI
- 6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
- 8 SISTEMATIKA PELAPORAN

9

BAB II RENCANA KINERJA

- 10 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024
- 13 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

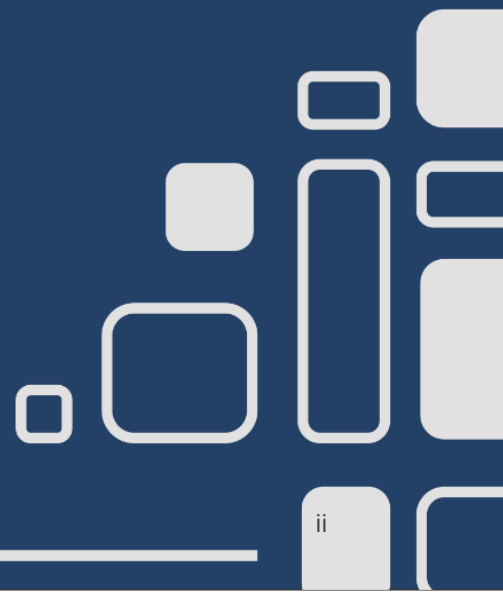
14

BAB III REALISASI KINERJA

- 15 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
- 68 INOVASI KINERJA LAINNYA
- 69 AKUNTABILITAS KEUANGAN

72

BAB IV PENUTUP



REALISASI KINERJA

16 SASARAN KEGIATAN 1
MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN
ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN/DAERAH

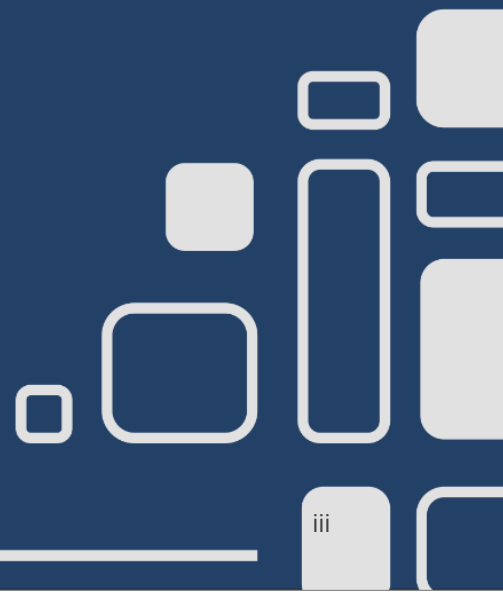
SASARAN KEGIATAN 2 **26**
MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN
ATAS PEMBANGUNAN NASIONAL

30 SASARAN KEGIATAN 3
MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN
ATAS BADAN USAHA

SASARAN KEGIATAN 4 **37**
MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN
ATAS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

43 SASARAN KEGIATAN 5
MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN
ATAS KUALITAS PENGENDALIAN INTERN K/L/BU

SASARAN KEGIATAN 6 **56**
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERWAKILAN
BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



DAFTAR TABEL

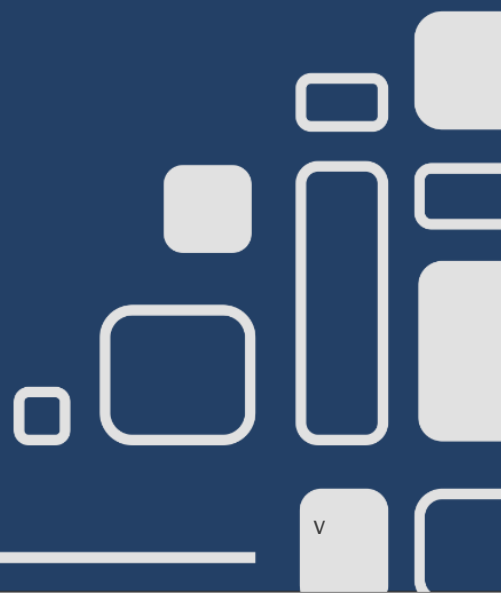
13	Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021
16	Tabel 3.1	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah
18	Tabel 3.2	Rincian Nilai Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi
19	Tabel 3.3	Rincian Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
22	Tabel 3.4	Rincian Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah
26	Tabel 3.5	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional
27	Tabel 3.6	Rincian Jumlah Proyek Strategis Nasional yang diawasi
30	Tabel 3.7	Target dan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha
30	Tabel 3.8	Rincian Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat
34	Tabel 3.9	Rincian Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan
37	Tabel 3.10	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi
38	Tabel 3.11	Rincian Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
39	Tabel 3.12	Rincian Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
43	Tabel 3.13	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU
47	Tabel 3.14	Rincian Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
48	Tabel 3.15	Analisis Tren Manajemen Risiko Indeks 2020 dan 2021
50	Tabel 3.16	Rincian Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
52	Tabel 3.17	Rincian Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja
54	Tabel 3.18	Rincian Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai
56	Tabel 3.19	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
57	Tabel 3.20	Rincian Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
58	Tabel 3.21	Rincian Skor IKPA
59	Tabel 3.22	Rincian Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
60	Tabel 3.23	Rincian Nilai Pengelolaan BMN
62	Tabel 3.24	Rincian Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Profesi
64	Tabel 3.25	Rincian Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan Tepat Waktu
65	Tabel 3.26	Rincian Persentase Penyelesaian RTP
65	Tabel 3.27	Rincian Persentase Efektivitas Pengendalian Intern
69	Tabel 3.28	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 Menurut Jenis Belanja
70	Tabel 3.29	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 Menurut Program/ Kegiatan
71	Tabel 3.30	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 Menurut Sasaran Kegiatan
73	Tabel 4.1	Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2021

DAFTAR GRAFIK

- 17 Grafik 3.1 Target dan Realisasi Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah Yang Terealisasi
- 18 Grafik 3.2 Target dan Realisasi Nilai Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi
- 19 Grafik 3.3 Target dan Realisasi Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
- 23 Grafik 3.4 Target dan Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah
- 31 Grafik 3.5 Target dan Realisasi Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat
- 33 Grafik 3.6 Target dan Realisasi Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat
- 34 Grafik 3.7 Target dan Realisasi Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan
- 38 Grafik 3.8 Target dan Realisasi Persentase Hasil Pengawasan Refresif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
- 40 Grafik 3.9 Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
- 45 Grafik 3.10 Target dan Realisasi Jumlah APIP Pemda Kapabilitas APIP \geq Level 3
- 48 Grafik 3.11 Target dan Realisasi Jumlah dengan Pemda Maturitas SPIP \geq Level 3
- 51 Grafik 3.12 Target dan Realisasi Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Aplikasi Siswaskeudes
- 53 Grafik 3.13 Target dan Realisasi Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah
- 54 Grafik 3.14 Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset secara Memadai
- 57 Grafik 3.15 Target dan Realisasi Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
- 58 Grafik 3.16 Target dan Realisasi Skor IKPA
- 59 Grafik 3.17 Target dan Realisasi Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
- 61 Grafik 3.18 Target dan Realisasi Nilai Pengelolaan BMN
- 62 Grafik 3.19 Target dan Realisasi Nilai SAKIP
- 63 Grafik 3.20 Target dan Realisasi Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Profesi
- 64 Grafik 3.21 Target dan Realisasi Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan Tepat Waktu
- 66 Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan

DAFTAR GAMBAR

- 5 Gambar 1.1 Komposisi SDM
- 7 Gambar 1.2 Strategi atas Arah Kebijakan
- 8 Gambar 1.3 Sistematika Penyajian Laporan



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET 2021



SASARAN 1

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN
ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH YANG SUDAH DIREALISASIKAN

14.238,22%

POTENSI PENERIMAAN DAERAH YANG DIOPTIMALISASI

112.402,20%

EFISIENSI PENGELUARAN NEGARA DAN DAERAH

208,24%

PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

1.626,73%

* DIHITUNG BERDASARKAN NILAI RUPIAH



SASARAN 3

MENINGKATNYA PENGAWASAN
PEMBANGUNAN ATAS BADAN USAHA

11 BUMD YANG BERKINERJA SEHAT
DARI TARGET SEBANYAK 10

1 BLUD YANG BERKINERJA SEHAT
DARI TARGET SEBANYAK 1

47 BUMDES YANG MAMPU MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
DARI TARGET SEBANYAK 25



SASARAN 5

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN
ATAS KUALITAS PENGENDALIAN INTERN

APIP PROVINSI DENGAN KAPABILITAS APIP \geq LEVEL 3
REALISASI 1 DARI TARGET 1

100,00%

APIP KABUPATEN/KOTA DENGAN KAPABILITAS APIP \geq LEVEL 3
REALISASI 5 DARI TARGET 6

83,33%

PROVINSI DENGAN MATURITAS SPIP \geq LEVEL 3
REALISASI 1 DARI TARGET 1

100,00%

KABUPATEN/KOTA DENGAN MATURITAS SPIP \geq LEVEL 3
REALISASI 12 DARI TARGET 12

100,00%

KABUPATEN/KOTA MRI \geq LEVEL 3
TIDAK ADA REALISASI DARI TARGET 1

0,00%

DESA YANG MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
REALISASI 1.863 DARI TARGET 839

218,83%

APIP YANG MENGIMPLEMENTASIKAN SISWASKEUDES
REALISASI 1 DARI TARGET 1

100,00%

PEMDA YANG AKUNTABEL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA
REALISASI 3 DARI TARGET 8

21,43%

DESA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ASET DESA
REALISASI 8 DARI TARGET 3

160,00%

KETERANGAN :

CAPAIAN DENGAN WARNA HIJAU ADALAH CAPAIAN YANG MEMENUHI TARGET
CAPAIAN DENGAN WARNA MERAH ADALAH CAPAIAN YANG BELUM MEMENUHI TARGET

SASARAN 2

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN
ATAS PEMBANGUNAN NASIONAL



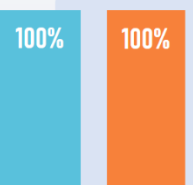
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL YANG TERCAPI SESUAI TARGET

PROYEK STRATEGIS
NASIONAL YANG DIAWASI

4

SASARAN 4

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN
ATAS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI



PEMANFAATAN HASIL PENGAWASAN REPRESIF

CAPAIAN 100,00% DARI TARGET 100%

PEMANFAATAN HASIL PENGAWASAN PREVENTIF DAN EDUKATIF

CAPAIAN 133,33% DARI TARGET 75%

* DIHITUNG DENGAN PERSENTASE HASIL PENGAWASAN YANG
SUDAH DIMANFAATKAN

SASARAN 6

MENINGKATNYA TATA KELOLA UNIT KERJA



- ZONA INTEGRITAS
- INDIKATOR KINERJA PELAKSANA ANGGARAN
- PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN YANG SESUAI SESUAI SAP
- PENGELOLAAN BMN
- SAKIP
- PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
- ADMINISTRASI SDM TEPAT WAKTU
- PENYELESAIAN RTP
- EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN
- INDEKS KEPUASAN LAYANAN UNIT KERJA

INOVASI KINERJA LAINNYA

- DUKUNGAN PERCEPATAN VAKSINASI
- FASILITASI PCR BEKERJA SAMA DENGAN LABKESPROV
- PROSES PERUBAHAN KANTOR MENJADI OPEN WORKING SPACE
- PENGHARGAAN SEBAGAI PERINGKAT KE 3 LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2021
- PERBAIKAN LAYANAN KETATAUSAHAAN DENGAN NILAI 81,64



(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)



BAB I

PENDAHULUAN

INTRODUCTION

- A. TUGAS DAN FUNGSI**
- B. STRUKTUR ORGANISASI**
- C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**
- D. SISTEMATIKA LAPORAN**

Dalam kedudukannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
1. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
2. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau atas permintaan Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada wilayah kerjanya; dan
4. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi vertikal di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan, yakni Rudy M. Harahap, Phd., CGCAE NIP 19690404 198903 1 001 berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-226/K/SU/2021 tanggal 8 April 2021.

Struktur organisasi terbaru Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP terdiri dari:

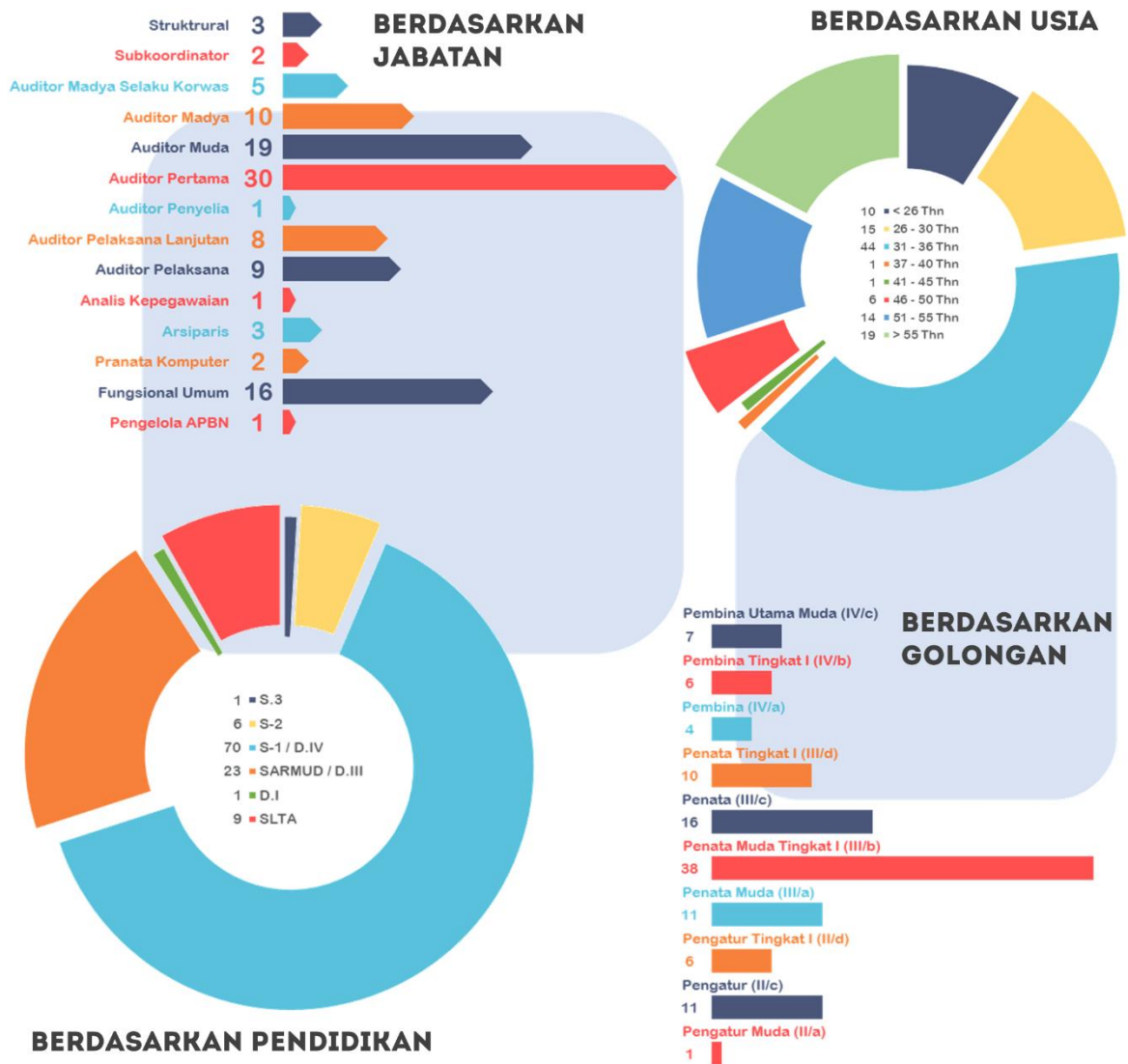
1. Kepala Perwakilan
2. Bagian Umum, Sub Koordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional
3. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2021 terdapat perampingan jabatan struktural di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pejabat fungsional, yaitu:

- Subbagian Umum menjadi Subkoordinator Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda.
- Subbagian Kepegawaian menjadi Subkoordinator Analisis SDM Aparatur Muda.
- Subbagian Keuangan menjadi Subkoordinator Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda.

Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 110 orang dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.1. Komposisi SDM



C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi BPKP merupakan pendekatan pemecahan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan intern. Hal ini dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP mendapatkan amanah untuk melakukan pengawasan intern dan pembinaan SPIP.

1. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja di lingkungan BPKP menetapkan arah kebijakan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 yang selaras dengan arah kebijakan BPKP dengan mempertimbangkan tantangan dan permasalahan terkait upaya pencapaian sasaran strategis BPKP, yaitu:

- a. Meningkatnya akuntabilitas keuangan negara dan daerah;
- b. Meningkatnya akuntabilitas pembangunan nasional dan daerah;
- c. Meningkatnya akuntabilitas badan usaha;
- d. Meningkatnya efektivitas pengendalian korupsi;
- e. Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada Pemda dan badan usaha; dan
- f. Meningkatnya kualitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

2. STRATEGI PENGAWASAN

Strategi pengawasan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP:

Gambar 1.2. Strategi atas Arah Kebijakan

STRATEGI ATAS ARAH KEBIJAKAN

MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

- Meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli
- Menggali semua potensi penerimaan negara/daerah
- Meningkatkan efisiensi pengeluaran negara dan daerah
- Meningkatkan penyelamatan keuangan negara
- Meningkatkan penyelamatan pengelolaan dana transfer dan pembiayaan daerah

STRATEGI ATAS ARAH KEBIJAKAN

MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

- Meningkatkan ketercapaian target program prioritas/kegiatan prioritas
- Meningkatkan ketercapaian target Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk pengelolaan keuangan dan aset
- Meningkatkan penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan

STRATEGI ATAS ARAH KEBIJAKAN

MENINGKATKAN AKUNTABILITAS BADAN USAHA

- Meningkatkan pengelolaan korporasi BUMD
- Meningkatkan kinerja BUMD/BLUD
- Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam menyusun laporan keuangan

STRATEGI ATAS ARAH KEBIJAKAN

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA

- Meningkatkan pemanfaatan/tindak lanjut hasil pengawasan represif
- Meningkatkan pemanfaatan/tindak lanjut hasil pengawasan preventif dan edukatif

STRATEGI ATAS ARAH KEBIJAKAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA

- Meningkatkan kapabilitas APIP Pemda
- Meningkatkan level maturitas SPIP Pemda
- Meningkatkan level indeks manajemen risiko pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan usaha
- Meningkatkan kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada BUMD/BLUD
- Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan kinerja
- Memberikan rekomendasi strategis (policy brief)

STRATEGI ATAS ARAH KEBIJAKAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA

- Melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- Meningkatkan kompetensi pegawai dan meningkatkan kualitas layanan administrasi SDM
- Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan meningkatkan layanan anggaran
- Meningkatkan kualitas pengelolaan BMN
- Meningkatkan kualitas implementasi dan level maturitas SPIP
- Meningkatkan kualitas manajemen risiko
- Meningkatkan kepuasan pihak internal
- Meningkatkan kepuasan pihak eksternal/stakeholders

Pelaksanaan strategi tersebut berupa kegiatan pengawasan yang dimuat dalam dokumen perencanaan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) dan dokumen penganggaran (RKA-KL) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Gambar 1.3. Sistematika Penyajian Laporan





BAB II

RENCANA KINERJA

PERFORMANCE PLAN

- A. TARGET KINERJA 2020-2024**
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan BPKP, Peraturan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP sebagaimana tertuang dalam Renstra BPKP tahun 2020-2024.

A. TARGET KINERJA 2020-2024

1. Pernyataan Visi

Untuk melaksanakan amanah yang terkandung dalam peran dan fungsi BPKP dan dengan pertimbangan kondisi, permasalahan dan potensi permasalahan yang dihadapi, BPKP selama periode Renstra Tahun 2020-2024 mengusung visi:

Menjadi Auditor Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik Dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 melalui pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pembangunan nasional dan daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit kerja pada BPKP memandang visi BPKP tersebut sebagai visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan panduan organisasi dalam melaksanakan peran dan manfaat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pernyataan Misi

BPKP melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan misi:

- a. Melaksanakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional;
- b. Membangun Sumber Daya Pengawasan Yang Berkualitas.

BPKP mengemban amanah untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional dan membangun sumber daya yang berkualitas yang merupakan *enablers* BPKP, yaitu kemampuan, energi dan sumberdaya yang dimiliki BPKP yang berkontribusi terhadap suksesnya BPKP dalam merealisasikan visinya. Misi untuk membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas terdiri dari SDM pada internal BPKP dan pada APIP di luar BPKP (APIP K/L/D).

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit kerja pada BPKP, memandang misi BPKP tersebut sebagai misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan panduan organisasi dalam melaksanakan peran dan manfaat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Tujuan

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP tersebut, Tujuan BPKP pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (2024)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	21
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat	IACM BPKP Indeks RB Indeks Kesehatan	Level 4 84 75

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP bertugas melakukan pengawalan atas ketercapaian sasaran pembangunan nasional, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat terhadap masyarakat dan mendorong pengelolaan keuangan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengawasan yang bersifat penjaminan (*assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting*).

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit kerja pada BPKP, memandang tujuan BPKP tersebut sebagai tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang harus diwujudkan dan menjadi acuan dalam menyusun sasaran kegiatan dan penentuan arah kebijakan dan strategi serta kegiatan pengawasan yang tepat di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Sasaran Kegiatan

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja eselon II bertanggung jawab atas kegiatan dan sasaran kegiatan.

Sasaran kegiatan merupakan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan unit kerja eselon II mandiri yang memiliki keterkaitan dan

hubungan sebab akibat dengan sasaran strategis BPKP dan selaras dengan sasaran program pada Kedeputian di lingkungan BPKP.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Rincian sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, beserta target kinerja 2020-2024 tersaji pada Lampiran 1.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET SATUAN	JUMLAH
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah			
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	518
1.2	Nilai Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	863
1.3	Nilai efisiensi pengeluaran Negara dan daerah	Rupiah (Juta)	186.546
1.4	Nilai penyelamatan keuangan Negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1.560
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional			
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1
2.2	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang diawasi	PSN	4
3 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha			
3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	10
3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BUMD	1
3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	25
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi			
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	75
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU			
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1
5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	6
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1
5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	12
5.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	3
5.6	Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Desa	839
5.7	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1
5.8	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	8
5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	5
6 Meningkatkan Tata Kelola Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan			
6.1	Nilai Skor Zona Integritas	Skor Skala 100	75
6.2	Skor IKPA	Skor Skala 100	95
6.3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen	95
6.4	Nilai Pengelolaan BMN	Nilai	80
6.5	Nilai SAKIP	Skor Skala 100	80
6.6	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persen	100
6.7	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
6.8	Persentase penyelesaian RTP	Persen	100
6.9	Persentase efektivitas pengendalian intern	Persen	65
6.10	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	75



BAB III

REALISASI KINERJA

PERFORMANCE REALIZATION

- A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**
- B. KINERJA LAINNYA**
- C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan yang diambil dalam pencapaian sasaran kegiatan, serta penggunaan sumber daya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja dan menyajikan akuntabilitas kinerja tahun 2021.

A. CAPAIAN KINERJA 2021

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

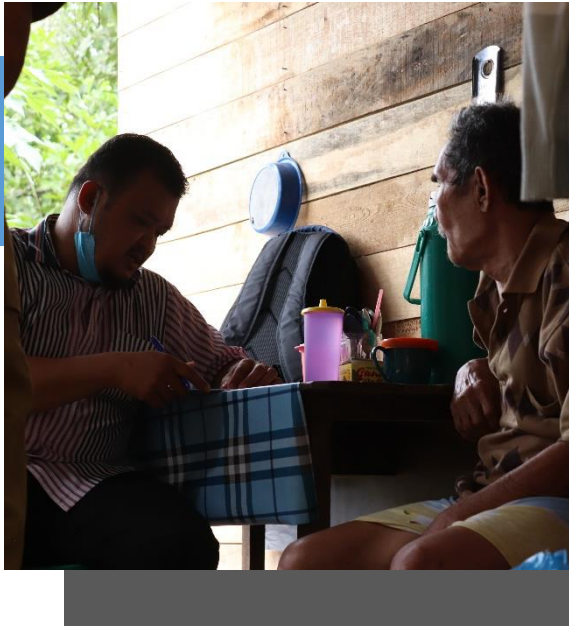
Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri yaitu:

Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa 27 indikator kinerja (90,00%) telah mencapai target dan 3 indikator kinerja (10,00%) belum mencapai target dari 30 indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Lampiran 2.

2. Analisis Capaian Kinerja



SASARAN KEGIATAN 1

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah menunjukkan sebanyak 4 indikator kinerja (100%) telah tercapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Sasaran Kegiatan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	518	73.754	14.238,22	●
1.2	Nilai potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rp (Juta)	863	970.031	112.402,20	●
1.3	Nilai efisiensi pengeluaran Negara dan daerah	Rp (Juta)	186.546	388.191	208,09	●
1.4	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	1.560	25.377	1626,73	●

Uraian empat indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah sebagai berikut:

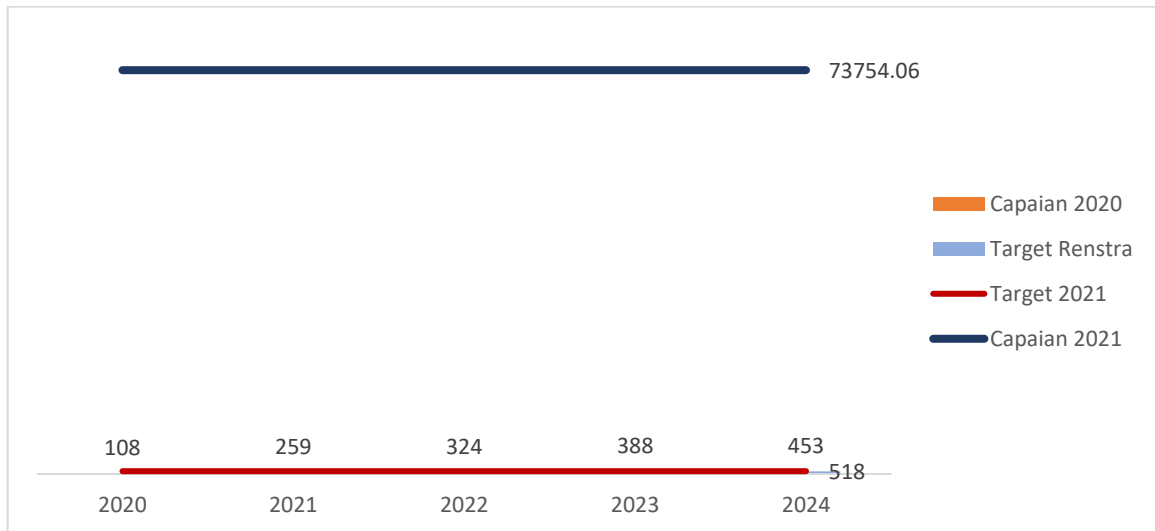
1.1. NILAI OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH YANG TEREALISASI

Indikator ini diukur dengan nilai rupiah atas potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi yang telah disetorkan ke kas daerah.

Realisasi tahun 2021 adalah Rp73.754.058.673,00 atau mencapai 14.238,22% dari target Rp518.000.000,00.

Indikator ini dapat diperbandingkan dengan indikator nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi dalam Renstra 2020-2024 sebagaimana pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1. Target dan Realisasi Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah Yang Terealisasi



Dari Grafik 3.1, nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 16.281,25% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini, antara lain, adalah kegiatan evaluasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), monitoring capaian Pendapatan Asli Daerah, atensi kepada Kepala Daerah, serta penyampaian informasi pengawasan melalui media massa.

Hasil pengawasan menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Duplikasi dan ketidaksinkronan data serta penetapan target Pajak Kendaraan Bermotor	1	1
2	Pajak tidak tertagih	1	1
3	Potensi kecurangan	1	1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan telah merekomendasikan perealisasi hasil optimalisasi penerimaan daerah senilai Rp962.291.281.980.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain, adalah komunikasi antar pimpinan sangat baik dan kerjasama yang baik dengan media massa dan *stakeholder* dalam rangka sosialisasi hasil pengawasan.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, menyusun nota kesepahaman dengan *stakeholder* terkait dan memperbaiki data dan memperbaiki pengelolaan data perpajakan.

1.2. NILAI POTENSI PENERIMAAN DAERAH YANG DIOPTIMALISASI

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah atas potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi.

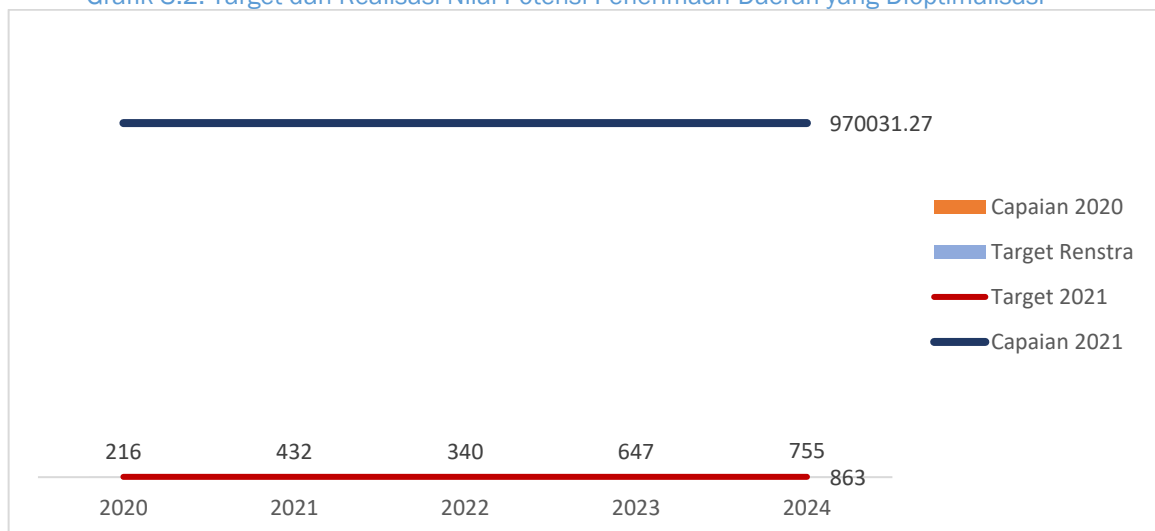
Realisasi tahun 2021 adalah Rp970.031.272.382,00 atau mencapai 112.402,20% dari target Rp863.000.000,00, dengan rincian pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rincian Nilai Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	962.291.281.980
2	Pajak Daerah	1.577.905.402
3	Retribusi Daerah	6.162.085.000
Jumlah		970.031.272.382

Indikator ini dapat diperbandingkan dengan indikator nilai potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi dalam Renstra 2020-2024 sebagaimana pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2. Target dan Realisasi Nilai Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi



Dari Grafik 3.2, nilai potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 128.480,96% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Aktivitas-aktivitas penting tahun 2021 yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini adalah kegiatan evaluasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), evaluasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, monitoring capaian Pendapatan Asli Daerah, atensi kepada Kepala Daerah, serta penyampaian informasi pengawasan melalui media massa. Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Pengelolaan risiko belum optimal	3	3
2	Penurunan efektivitas realisasi penerimaan PAD	2	2
3	Tidak optimalnya upaya diversifikasi (ekstensifikasi dan intensifikasi)	3	3
4	Belum dilakukannya penetapan NPWPD	1	1
5	Peraturan Daerah tidak diterapkan secara tegas	1	1
6	Rasio derajat desentralisasi fiskal kategori kurang	1	1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan telah merekomendasikan optimalisasi penerimaan daerah senilai Rp970.031.272.382.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya komitmen Kepala Daerah dan OPD dalam usaha meningkatkan PAD.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah mendorong pemerintah daerah dalam memitigasi risiko dalam pengelolaan PAD.

1.3. NILAI EFISIENSI PENGELUARAN NEGARA DAN DAERAH

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun.

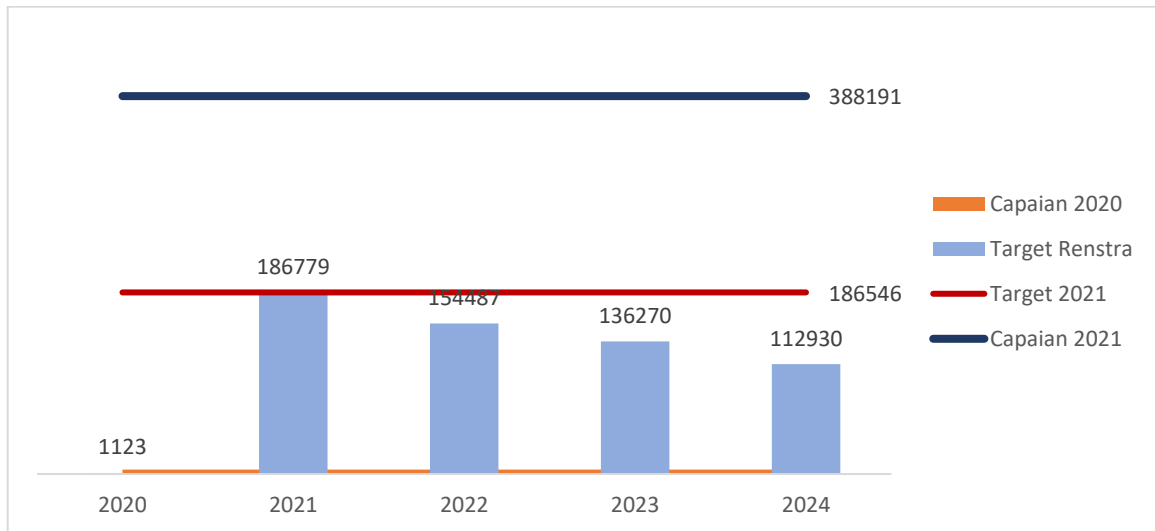
Realisasi tahun 2021 Rp388.191.490.175,67 atau mencapai 208,09% dari target Rp186.546.000.000,00 dengan rincian pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Rincian Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

NO.	URAIAN	NILAI (RP)
1	Hasil Pengawasan Bidang APD	366.291.109.529,00
2	Hasil Pengawasan Bidang IPP	1.031.155.222,36
3	Hasil Pengawasan Bidang Investigasi	20.870.332.687,92
Jumlah		388.191.490.174,67

Indikator ini dapat diperbandingkan dengan gabungan indikator Nilai Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah dan indikator Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah dalam Renstra 2020-2024 sebagaimana pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3. Target dan Realisasi Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah



Dari Grafik 3.3, nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 343,75% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran dalam bentuk evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi program, kegiatan, dan anggaran, serta keselarasan perencanaan pemerintah daerah atas penyelenggaraan sektor strategis pembangunan.

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Sub Kegiatan berpotensi tidak efektif atau tidak selaras dalam mendukung sasaran	3	3
2	Sub Kegiatan memuat aktivitas atau komponen belanja yang berpotensi tidak efisien atau tidak relevan	3	3

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menyimpulkan terdapat sub kegiatan tidak efektif dan tidak relevan Rp363.046.820.296.

2. Evaluasi Tahun 2021 atas Penggunaan Dana Transfer dalam bentuk evaluasi terhadap efektifitas penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Rujukan Tahun 2018-2020, dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai Cadangan DAK Fisik Tahun 2020 dan DAK Fisik Tahun 2021.

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Kelebihan perhitungan volume RAB dan Dokumen <i>Mutual Check</i> (MCO)	1	1
2	Belum maksimalnya pemanfaatan alat	1	1
3	Kekurangan volume pekerjaan	1	1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menyimpulkan terdapat temuan hasil pengawasan Rp3.162.507.133.

3. Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Alat Material Kesehatan (Almatkes) Untuk Penanganan Covid-19 Bersumber Dana APBD.

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Terdapat kemahalan harga atas pengadaan barang/jasa	1	1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menyimpulkan terdapat kemahalan harga Rp81.782.100.

4. Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan yang bertujuan untuk menguji ketaatan atas pemenuhan kewajiban PNPB wajib bayar.

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Kesalahan penghitungan royalti	2	2

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menyimpulkan terdapat kekurangan penyetoran Rp1.031.155.222,36.

5. Audit Penyesuaian Harga yang dilakukan dalam rangka pengamanan pengeluaran keuangan negara dengan melakukan penghitungan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan permintaan pimpinan mitra kerja. Dari kegiatan-kegiatan audit penyesuaian harga tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Kurang cermatnya tim evaluasi dalam mengevaluasi komponen pembentuk harga satuan	4	4

Atas hal-hal yang perlu diperbaiki di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menghasilkan nilai efisiensi pengeluaran negara Rp20.471.379.884,90.

6. Audit Klaim

Dari kegiatan Audit Klaim tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Komponen pembentuk harga satuan tidak konsisten	1	1

Atas hal-hal yang perlu diperbaiki di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menghasilkan nilai efisiensi pengeluaran negara Rp397.845.538,41.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain adanya alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan, sinergi yang baik antara Kementerian ESDM dengan BPKP, adanya manajemen perubahan yang dikontribusi dari kepemimpinan yang kondusif, penataan tatalaksana yang lebih baik, pedoman pengawasan yang lebih berkualitas, dan kepercayaan dari mitra kerja terhadap kompetensi BPKP.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja antara lain meningkatkan kegiatan *consulting* dan *assurance* terkait peningkatan kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran dan mempertahankan kerjasama antara Kementerian ESDM dengan BPKP yang telah berjalan dengan baik.

1.4. NILAI PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan temuan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dan nilai aset yang dipulihkan.

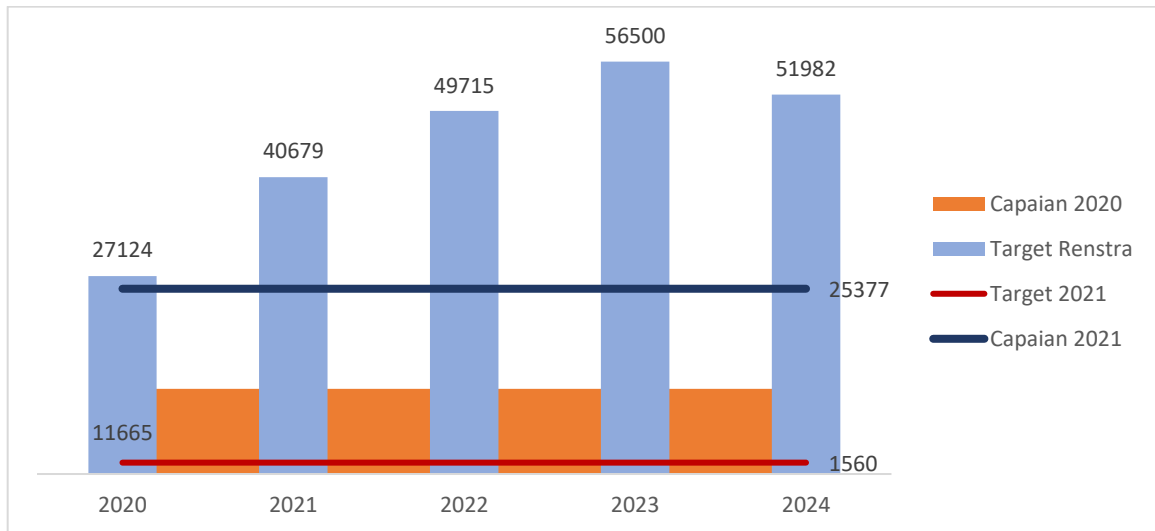
Realisasi tahun 2021 Rp25.377.275.976,70 atau mencapai 1626,75% dari target Rp1.560.000.000,00, dengan rincian pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Rincian Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Audit Investigatif	792.616.700,00
2	Audit PKKN	14.879.807.660,41
3	Audit lainnya	7.092.793.217,56
4	Reviu	2.612.058.398,73
Jumlah		25.377.275.976,70

Perbandingan realisasi nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2020-2024 pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4. Target dan Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah



Dari Grafik 3.4, nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 48,64% dari target akhir Renstra Tahun 2024.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Audit Investigatif

Kegiatan pengawasan dalam rangka audit investigatif dilaksanakan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian tentang indikasi tindak pidana korupsi dan tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Dari kegiatan audit investigatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Adanya mark up	1	1
2	Adanya penggelapan	1	1

Atas hal-hal yang perlu diperbaiki di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menghasilkan nilai potensi kerugian keuangan negara/daerah Rp792.616.700,00.

2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyelidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Dari kegiatan-kegiatan audit PKKN tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Adanya mark up	5	4
2	Adanya penggelapan	6	4

Atas hal-hal yang perlu diperbaiki di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menghasilkan nilai hasil audit kerugian keuangan negara/daerah Rp14.879.807.660,41.

3. Audit lainnya

Kegiatan pengawasan yang dilakukan berupa Audit atas laporan keuangan dan Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit terhadap Penambahan Nilai Pagu Persetujuan Kontrak, Audit atas Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir.

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Ketidacermatan dalam verifikasi	2	2
2	Tidak ada pemeriksaan bersama dengan Penyedia dalam pengukuran realisasi Konstruksi dan penghitungan nilai Jaminan	1	1
3	Tidak ada klarifikasi kesiapan Fasilitator dalam pekerjaan	1	1
4	Adanya perubahan harga yang belum disesuaikan.	1	1
5	Ketidacermatan dalam memperhitungkan biaya konstruksi	2	2
6	Ketidacermatan dalam memperhitungkan usulan penambahan pagu anggaran	1	1
7	tidak memperhatikan <i>value for money</i> , kewajaran harga, dan prinsip pengadaan barang/jasa dalam menyusun kontrak	2	2

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menghasilkan temuan Rp7.092.793.217,56.

4. Reviu

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan berupa Reviu atas Bantuan Subsidi Upah (BSU), Reviu Progres Pembangunan Fasilitas, Reviu Tunggakan Honorarium, Reviu Pembayaran Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Ketidaksesuaian data Dapodik.	1	1
2	Tidak adanya pengecekan ulang terhadap PTK penerima bantuan subsidi upah.	1	1
3	Penyedia Jasa dan Manajemen Konsultan kurang cermat	1	1
4	PPK dan Penyedia Jasa lalai dalam melakukan <i>Contract Change Order</i> (CCO)	2	2
5	Tidak adanya pembinaan sesuai syarat minimal	1	1
6	Tidak adanya evaluasi dan penerbitan dokumen harga satuan timpang	2	2

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
	Manajemen Konstruksi tidak melakukan pemeriksaan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan	1	1
	Tidak adanya verifikasi kelengkapan dokumen	1	1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menghasilkan temuan Rp2.612.058.398,73.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain adanya manajemen perubahan yang dikontribusi dari kepemimpinan yang kondusif, penataan tatalaksana yang lebih baik, pedoman pengawasan yang lebih berkualitas, penataan sistem manajemen SDM, kompetensi SDM semakin meningkat, dan kepercayaan dari mitra kerja terhadap kompetensi BPKP.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan keberhasilan capaian kinerja tahun 2021 serta meningkatkan capaian kinerja tahun 2022, antara lain meningkatkan metode pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan kompetensi auditor untuk lebih agile dan melanjutkan hubungan baik dengan mitra.

PENGGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah memiliki rincian *output* dengan realisasi sebanyak 42 laporan atau sebanyak 110,53% dari target sebanyak 38 laporan, dengan dukungan realisasi dana Rp497.478.979 atau 99,84% dari anggaran Rp498.280.000 dan penggunaan SDM sebanyak 3.317 OH atau 96,09% dari rencana sebanyak 3.452 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 110,53% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,84%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 110,53% lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 96,09%.



SASARAN KEGIATAN 2

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional menunjukkan sebanyak 2 indikator kinerja (100%) telah tercapai sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1	1	100,00%	●
2.2	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang diawasi	PSN	4	4	100,00%	●

Uraian dua indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

2.1. JUMLAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TERCAPAI SESUAI TARGET

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan Proyek Strategis Nasional yang tercapai target kinerja yang tercantum dalam RKP pada tahun pelaporan.

Realisasi tahun 2021 satu PSN atau mencapai 100% dari target satu PSN, yaitu Bendungan Tapin.

Indikator ini merupakan inovasi di tahun 2021 karena pada dokumen Renstra, indikator ini memiliki target 0 selama 5 tahun. Oleh karena itu tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun lalu ataupun dengan target 2024.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional

Kegiatan Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis bertujuan untuk memperoleh gambaran dan mengidentifikasi permasalahan serta solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Penerbitan Sertifikasi Operasi dan Pemeliharaan lambat.	1	1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan rekomendasi perbaikan sehingga PSN dapat tercapai sesuai target.

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan kepercayaan mitra terhadap hasil audit BPKP.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan keberhasilan antara lain menjaga kepercayaan mitra kerja melalui pemberian rekomendasi yang menguntungkan semua pihak dan meningkatkan kompetensi auditor guna menjaga kualitas hasil pengawasan.

2.2. JUMLAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG DIAWASI

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan Proyek Strategis Nasional yang diawasi dengan kegiatan pengawasan yang tercantum dalam RKP pada tahun pelaporan.

Realisasi tahun 2021 empat PSN atau mencapai 100% dari target empat PSN, dengan rincian pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Rincian Jumlah Proyek Strategis Nasional yang diawasi

NO.	URAIAN
1	PSN Kawasan Industri Jorong
2	PSN Sertifikasi Lahan
3	PSN TORA
4	PSN Bendungan Tapin

Indikator ini merupakan inovasi di tahun 2021 sehingga tidak tercantum pada Renstra 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun lalu ataupun dengan target 2024.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional

Kegiatan Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional bertujuan untuk memperoleh gambaran dan mengidentifikasi permasalahan serta solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai bagian dari pengawasan tata kelola PSN sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Penerbitan Sertifikasi Operasi dan Pemeliharaan lambat.	1	1
2	Data penelitian lapang dan data peserta subyek redistribusi tanah belum lengkap	2	2
3	Sidang PPL terlambat		
3	Komitmen pertanggungjawaban realisasi keuangan rendah.	1	1
4	Belum dilakukan pembebasan lahan	1	1
5	Belum dilakukannya promosi	1	1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan rekomendasi perbaikan.

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan kepercayaan mitra terhadap hasil audit BPKP.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan keberhasilan antara lain menjaga kepercayaan mitra kerja melalui pemberian rekomendasi yang menguntungkan semua pihak dan meningkatkan kompetensi auditor guna menjaga kualitas hasil pengawasan.

PENGGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional memiliki rincian *output* dengan realisasi sebanyak 44 laporan atau sebanyak 107,32% dari target sebanyak 41 laporan, dengan dukungan realisasi dana Rp586.136.534 atau 99,39% dari anggaran Rp589.750.000 dan penggunaan SDM sebanyak 2.793 OH atau 92,15% dari rencana sebanyak 3.031 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran 2 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 107,32% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,39%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran 2 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 107,32% lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 92,15%.



SASARAN KEGIATAN 3

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS BADAN USAHA

Pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha menunjukkan sebanyak 3 indikator kinerja (100%) telah tercapai sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	10	11	110,00	●
3.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BUMD	1	1	100,00	●
3.4	Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan	BUMDes	25	47	188,00	●

Uraian tiga indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha adalah sebagai berikut:

3.1. JUMLAH BUMD DENGAN KINERJA SEHAT

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan jumlah BUMD dengan kinerja sehat berdasarkan hasil evaluasi pada tahun pelaporan. BUMD yang dimaksud dalam hal ini adalah BUMD Jasa Air (PDAM).

Realisasi tahun 2021 adalah sebanyak 11 BUMD atau mencapai 110% dari target 10 BUMD, dengan ringkasan pada Tabel 3.8.

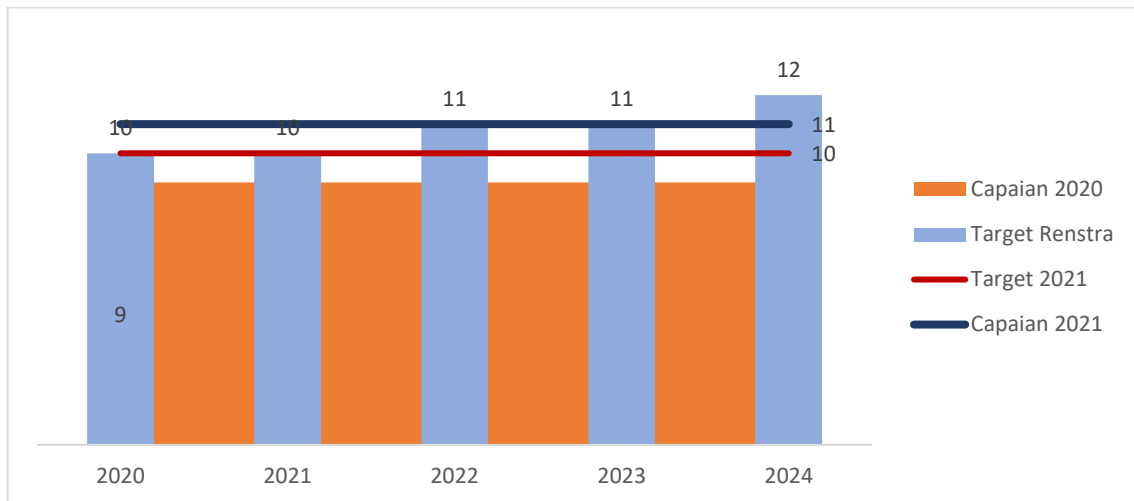
Tabel 3.8. Ringkasan Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

NO	NAMA BUMD	SKOR	TINGKAT KESEHATAN
1	PDAM Bandarmasih	3.62	Sehat
2	PDAM Kabupaten Tapin	3.32	Sehat
3	PDAM Kabupaten Tanah Laut	3.22	Sehat
4	PDAM Kabupaten Balangan	3.18	Sehat
5	PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.14	Sehat

NO	NAMA BUMD	SKOR	TINGKAT KESEHATAN
6	PDAM Kabupaten Tabalong	3.13	Sehat
7	PDAM Intan Banjar	3.10	Sehat
8	PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara	2.98	Sehat
9	PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu	2.98	Sehat
10	PDAM Kabupaten Barito Kuala	2.88	Sehat
11	PDAM Kabupaten Kotabaru	2.88	Sehat

Perbandingan realisasi jumlah BUMD dengan kinerja sehat tahun 2021 dengan target Renstra tahun 2020-2024 pada Grafik 3.5.

Grafik 3.5. Target dan Realisasi Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat



Dari Grafik 3.5, jumlah BUMD dengan kinerja sehat telah mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 91,67% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini adalah kegiatan evaluasi kinerja pada BUMD air minum pada PDAM kabupaten/kota.

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Rendahnya tarif yang berlaku	9	9
2	Tingginya tingkat kehilangan air	1	1
3	Kualitas air belum sesuai dengan Permenkes NO 492 Tahun 2010	11	11
4	Rendahnya sambungan baru pelanggan	5	5
5	Rendahnya tera dan penggantian water meter pelanggan	6	6
6	Belum terpasangnya water meter induk produksi dan distribusi	5	5
7	Rencana bisnis belum mempertimbangkan manajemen risiko perusahaan dan dokumen perencanaan daerah	3	3
8	Belum ada kebijakan pengelolaan aset	2	2
9	Salah pembukuan dan belum tercatat Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya.	4	4
10	Kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai	2	2
11	Perusahaan belum memiliki Surat Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) yang digunakan dalam usahanya	5	5

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
12	Tekanan air pelanggan di bawah 0,7 bar	2	2
13	Kekosongan jabatan direktur PDAM	1	1
14	Amandemen perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT Drupadi Agung Lestari belum dilaksanakan	1	1
15	Reklasifikasi pelanggan belum dilaksanakan	1	1
16	Terdapat selisih saldo piutang menurut akuntansi dan billing system	1	1
17	Perusahaan belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak	1	1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan rekomendasi kepada PDAM sehingga dapat berkinerja sehat.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain penurunan rata-rata air tanpa rekening dan cakupan pelayanan teknis yang melampaui target.

Walaupun capaian kinerja telah mencapai target, tetapi terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi kendala yang perlu segera diselesaikan oleh BUMD, yaitu terdapat PDAM yang menjual air di bawah biaya dasarnya, kurangnya kontinuitas pelayanan PDAM, kurangnya kualitas air yang belum memenuhi syarat air minum, dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan kinerja dengan cara melakukan pembinaan kepada pengelola BUMD agar mereka mampu menerapkan manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan fungsi dan peran Satuan Pengawas Internal perusahaan, dan Pengendalian atas risiko fraud. Selain itu Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengkaji tarif air minum.

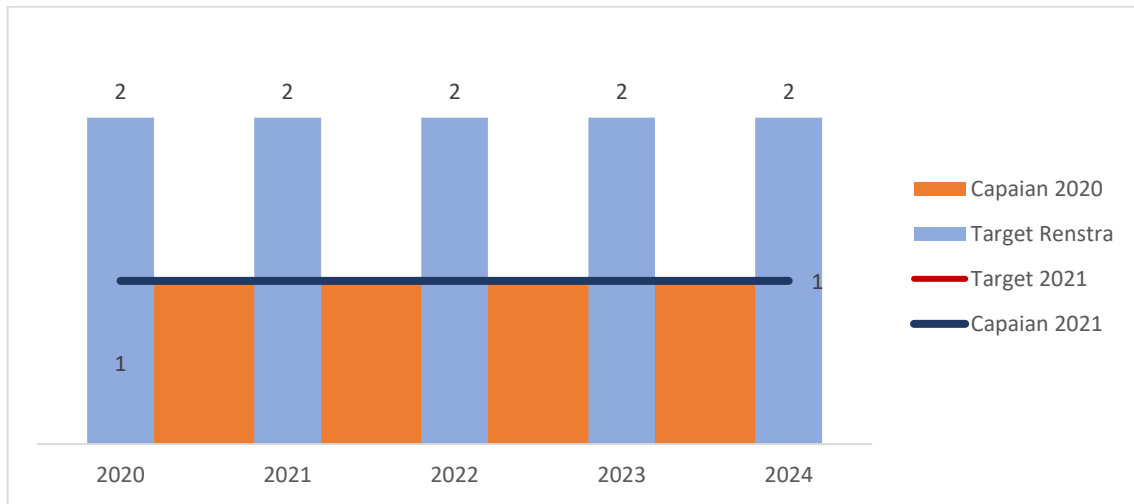
3.2. JUMLAH BLUD DENGAN KINERJA SEHAT

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan BLUD dengan kinerja sehat berdasarkan hasil evaluasi pada tahun pelaporan.

Realisasi tahun 2021 adalah sebanyak 1 BLUD atau mencapai 100,00% dari target 1 BLUD, yaitu RSUD H. Hasan Basry Kandungan dengan skor 76,12.

Perbandingan realisasi jumlah BLUD dengan kinerja sehat tahun 2021 dengan target Renstra tahun 2020-2024 pada Grafik 3.6.

Grafik 3.6. Target dan Realisasi Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat



Dari Grafik 3.6, jumlah BLUD dengan kinerja sehat sama dengan tahun 2020 dan telah mencapai 50,00% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini adalah evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah.

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai	1	1
2	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemeriksaan dan penanganan masalah kesehatan secara dini	1	1
3	Keterlambatan waktu visite dokter	1	1
4	Kurangnya kedisiplinan pegawai	1	1
5	Lamanya pelayanan bagian farmasi	1	1
6	Kurangnya pengawasan pada baku mutu limbah cair	1	1
7	Kurangnya koordinasi dengan Dewan Pengawas dan Bupati terkait komposisi pemenuhan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas	1	1

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada Rumah Sakit agar dapat berkinerja sehat.

Walaupun capaian kinerja telah mencapai target, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu kas dan setara kas yang cukup tinggi serta rendahnya stok persediaan, terjadi defisit jangka pendek, SOP pengelolaan utang tidak ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berkurangnya jumlah kunjungan pasien, kesalahan penggunaan alat kesehatan, penulisan resep tidak sesuai dengan formularium, pengulangan pemeriksaan laboratorium, pengurangan biaya diklat, penundaan pelaksanaan diklat, terbatasnya jumlah pegawai bagian farmasi, tingkat kepuasan pasien masih rendah, dan pengawasan terhadap salah satu indikator limbah kurang optimal.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja yang perlu dilakukan adalah mengangkat dewan pengawas rumah sakit, mendaftarkan tenaga medis dan SPI untuk mengikuti pelatihan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan fasilitas kesehatan, meningkatkan kedisiplinan dokter dan pegawai, mengevaluasi kebutuhan SDM pada bagian depo farmasi, serta meningkatkan pengawasan pada baku mutu limbah cair.

3.3. JUMLAH BUMDES YANG MAMPU MENYUSUN LAPORAN

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan pada tahun pelaporan.

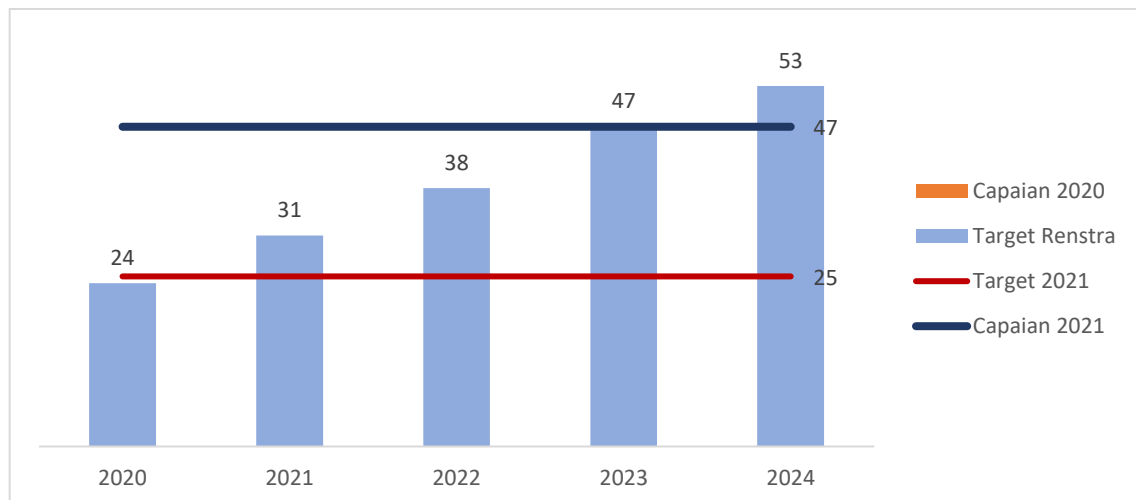
Realisasi tahun 2021 adalah sebanyak 47 BUMDes atau mencapai 188,00 % dari target 25 BUMDes, dengan rincian pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Rincian Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

NO	KABUPATEN	JUMLAH BUMDES YANG MENYUSUN LAPORAN
1	Kotabaru	4
2	Banjar	27
3	Barito Kuala	1
4	Tapin	6
5	Hulu Sungai Selatan	1
6	Hulu Sungai Tengah	3
7	Hulu Sungai Utara	4
8	Balangan	1
Jumlah		47

Perbandingan realisasi Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan tahun 2021 dengan target Renstra tahun 2020-2024 pada Grafik 3.7.

Grafik 3.7. Target dan Realisasi Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan



Dari Grafik 3.7, jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 88,68% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan adalah asistensi tata kelola Keuangan menggunakan aplikasi SIA BUMDes, dan pemantauan aplikasi PANDAN Desa.

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Keterbatasan pengetahuan dalam bidang akuntansi pada sebagian besar pelaksana BUMDesa	2	2

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan *transfer of knowledge* sehingga BUMDes dapat menyusun laporan.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, yaitu adanya pembinaan dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIA BUMDes.

Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh BUMDes dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, yaitu keterbatasan pelaksana operasional BUMDes dalam bidang akuntansi, dan rendahnya pemahaman teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi SIA BUMDes.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah melakukan monitoring dan pembinaan secara rutin kepada para pelaksana operasional BUMDes, berkoordinasi dengan petugas pendamping desa setempat dalam rangka monitoring dan pembinaan BUMDes, mengadakan kegiatan bimtek/sosialisasi/asistensi lanjutan, serta mengarahkan BUMDes untuk masuk ke dalam *platform digital* dan menggunakan sistem pembayaran *digital*.

PENGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha memiliki rincian *output* dengan realisasi sebanyak 32 laporan atau sebanyak 103,23% dari target sebanyak 31 laporan, dengan dukungan realisasi dana Rp469.512.537 atau 98,31% dari

anggaran Rp477.572.000 dan penggunaan SDM sebanyak 1.476 OH atau 83,67% dari rencana sebanyak 1.764 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran 3 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 103,23% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 98,31%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran 3 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 103,23% lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 83,67%.



SASARAN KEGIATAN 4

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

Pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi menunjukkan sebanyak 2 indikator kinerja (100%) telah tercapai sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	●
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	75	100	133,33	●

Uraian dua indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah sebagai berikut:

4.1. PERSENTASE HASIL PENGAWASAN REPRESIF YANG DIMANFAATKAN/ DITINDAKLANJUTI

Indikator ini diukur dengan membagi jumlah Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dengan jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tiga tahun terakhir pada tahun pelaporan.

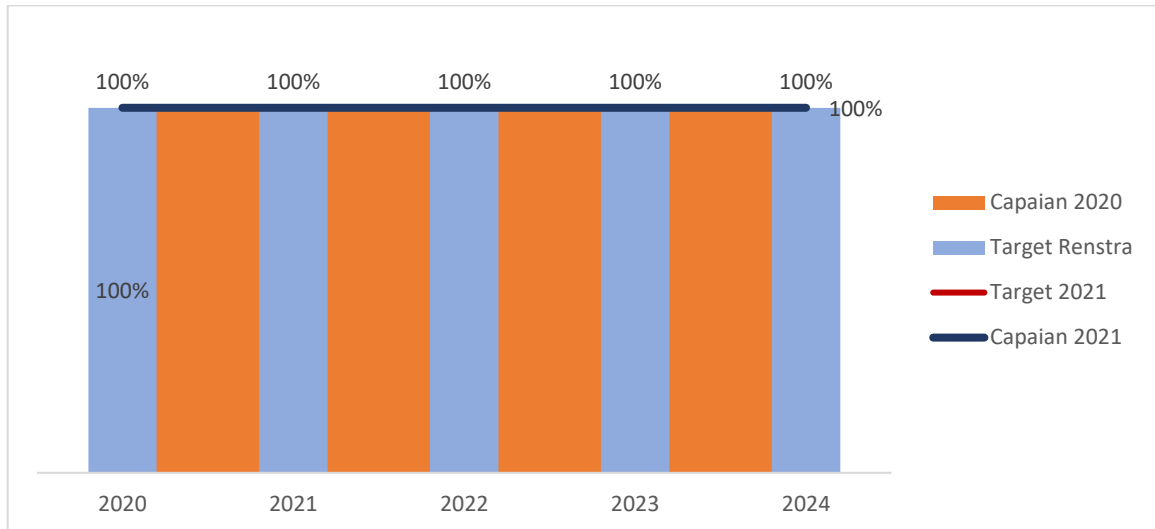
Realisasi tahun 2021 sebanyak 24 hasil pengawasan atau mencapai 100% dari target 100%, dengan rincian pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Rincian Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

NO	URAIAN	JUMLAH PKA	JUMLAH REKOMENDASI (RP)
1	PKA pada persidangan	11	10.215.468.875,09
2	PKA pada penyidik	11	14.341.021.622,07
3	PKA Lainnya	2	3.258.639.918,00
	Jumlah	24	27.815.130.415,16

Perbandingan realisasi persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2021 dengan target Renstra tahun 2020-2024 pada Grafik 3.8.

Grafik 3.8. Target dan Realisasi Persentase Hasil Pengawasan Refresif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti



Dari Grafik 3.8, persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sama dengan tahun 2020 dan telah mencapai 100,00% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. PKA pada Persidangan

Terdapat 11 Pemberian Keterangan Ahli pada persidangan, antara lain: PKA pada persidangan Proyek Pembangunan, PKA pada persidangan perkara penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah, PKA pada persidangan atas perkara penyalahgunaan pengelolaan Dana APBDes, PKA pada persidangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, dll.

Atas hal-hal di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menghasilkan nilai rekomendasi sejumlah Rp10.215.468.875,09.

2. PKA pada Penyidik

Terdapat 11 Pemberian Keterangan Ahli pada Penyidik, antara lain: PKA pada penyidik atas perkara penyalahgunaan belanja desa (APBDes), PKA kepada penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan fisik yang

bersumber dari Dana Desa, PKA pada penyidik sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Bermotor, PKA kepada Penyidik atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), dll.

Atas hal-hal di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menghasilkan nilai rekomendasi sejumlah Rp14.341.021.622,07.

3. PKA Lainnya

Terdapat 2 Pemberian Keterangan Ahli lainnya, yaitu PKA Penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dan PKA Proyek Pembangunan.

Atas hal-hal di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menghasilkan nilai rekomendasi sejumlah Rp3.258.639.918,00.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah kepercayaan mitra terhadap hasil audit BPKP.

Rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja adalah meningkatkan kompetensi pegawai guna menjaga kualitas audit dan meningkatkan kepercayaan mitra kerja.

4.2. PERSENTASE HASIL PENGAWASAN PREVENTIF DAN EDUKATIF YANG DIMANFAATKAN/ DITINDAKLAJUTI

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah daerah/OPD/badan usaha yang mengimplementasikan *Fraud Control Plan (FCP)/Fraud Risk Assessment (FRA)* dengan jumlah pemerintah daerah/OPD/badan usaha yang dilakukan pembinaan *FCP/FRA* pada tahun berjalan.

Realisasi tahun 2021 sebanyak 100% hasil pengawasan yang ditindaklanjuti atau mencapai 133,33% dari target 75%, dengan rincian pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Rincian Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

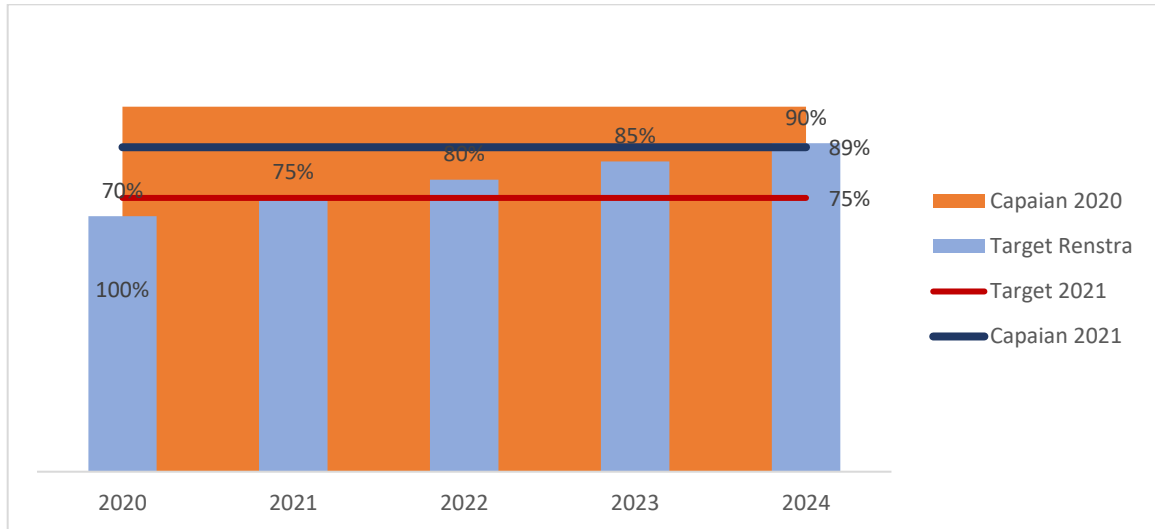
JUMLAH HASIL PENGAWASAN	YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI	PERSENTASE
5	5	100%

Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti diperoleh dari 5 pengawasan preventif dan edukatif yang dilaksanakan, dan seluruhnya dimanfaatkan/ditindaklanjuti.

Perbandingan realisasi persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 pada Grafik 3.9.

Grafik 3.9. Target dan Realisasi

Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti



Dari Grafik 3.9, persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti mengalami penurunan dari tahun 2020 dan telah mencapai 98,77% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan *Diagnostic Assessment Fraud Control Plan (FCP)*

Kegiatan Sosialisasi dan *Diagnostic Assessment Fraud Control Plan (FCP)* bertujuan untuk mencegah, memudahkan pendeteksian dan pengungkapan kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan dengan implementasi beberapa atribut dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dari kegiatan sosialisai FCP yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Belum adanya kebijakan tertulis terkait pengelolaan kecurangan	1	1

Atas hal-hal yang perlu perbaikan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan 1 rekomendasi.

2. Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*)

Kegiatan Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan pada proses pengelolaan keuangan Desa yang sumber pendapatannya berasal dari APBN, APBD, dan pendapatan asli desa. Dari kegiatan Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Dominasi kepala desa dalam pengelolaan keuangan	1	1

Atas hal-hal yang perlu perbaikan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan 1 rekomendasi.

3. Identifikasi dan Penyusunan Profil Risiko

Dari kegiatan identifikasi dan penyusunan profil risiko yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

NO.	AREA OF IMPROVEMENT	JUMLAH OBRIK	JUMLAH KAB/KOTA
1	Belum adanya dokumentasi atas identifikasi risiko serta langkah-langkah pencegahannya	3	2

Atas hal-hal yang perlu perbaikan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan 3 rekomendasi.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah kepercayaan mitra kerja terhadap rekomendasi BPKP guna mendukung pencegahan dan pengendalian kecurangan (*fraud*) di lingkungan kerjanya.

Rencana tindak peningkatan capaian kinerja/mempertahankan kinerja adalah dengan mengembangkan dan memperluas wawasan pegawai bidang Investigasi sehingga mampu membantu mitra kerja guna mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

PENGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi memiliki rincian *output* dengan realisasi sebanyak 33 laporan atau sebanyak 110,00% dari target sebanyak 30 laporan, dengan dukungan realisasi dana Rp385.638.147 atau 97,37% dari anggaran Rp396.039.000 dan penggunaan SDM sebanyak 1.784 OH atau 162,18% dari rencana sebanyak 1.100 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran 4 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 110,00% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 97,37%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran 4 belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 110,00% lebih kecil dari capaian penggunaan SDM sebesar 162,18%.



SASARAN KEGIATAN 5

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS KUALITAS PENGENDALIAN INTERN K/L/P/BU

Pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU menunjukkan sebanyak 6 indikator kinerja (66,67%) telah tercapai dan 3 indikator kinerja (33,33%) belum tercapai dari 9 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00	●
5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	6	5	83,33	●
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Pemda	1	1	100,00	●
5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Pemda	12	12	100,00	●
5.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	1	0	0,00	●
5.6	Jumlah desa yang menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Desa	839	1863	218,83	●
5.7	Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	1	100,00	●
5.8	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	8	3	21,43	●
5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	5	8	160,00	●

Uraian sembilan indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU adalah sebagai berikut:

5.1. JUMLAH APIP PROVINSI DENGAN KAPABILITAS APIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah provinsi dengan kapabilitas APIP \geq Level 3 (*Delivered*) pada tahun pelaporan berdasarkan hasil *quality assurance*/panel di tingkat Kedeputan.

Realisasi tahun 2021 adalah 1 APIP atau mencapai 100% dari target tahun 2021 sebanyak 1 APIP, yaitu Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Indikator ini berbeda dengan indikator pada Renstra 2020-2024, sehingga untuk membandingkan capaiannya dengan capaian tahun lalu, indikator yang digunakan merupakan gabungan dari indikator 5.1 dan indikator 5.2 yang dapat ditunjukkan pada Grafik 3.10.

Rencana tindak peningkatan capaian kinerja antara lain memberikan atensi kepada Gubernur, melakukan diseminasi/sosialisasi Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP kepada APIP Daerah, mendorong Inspektorat untuk melakukan penilaian mandiri sesuai dengan peningkatan kapabilitas APIP yang baru, dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dengan dengan Pimpinan APIP dan pejabat fungsional auditor melalui aplikasi *whatsapp group*.

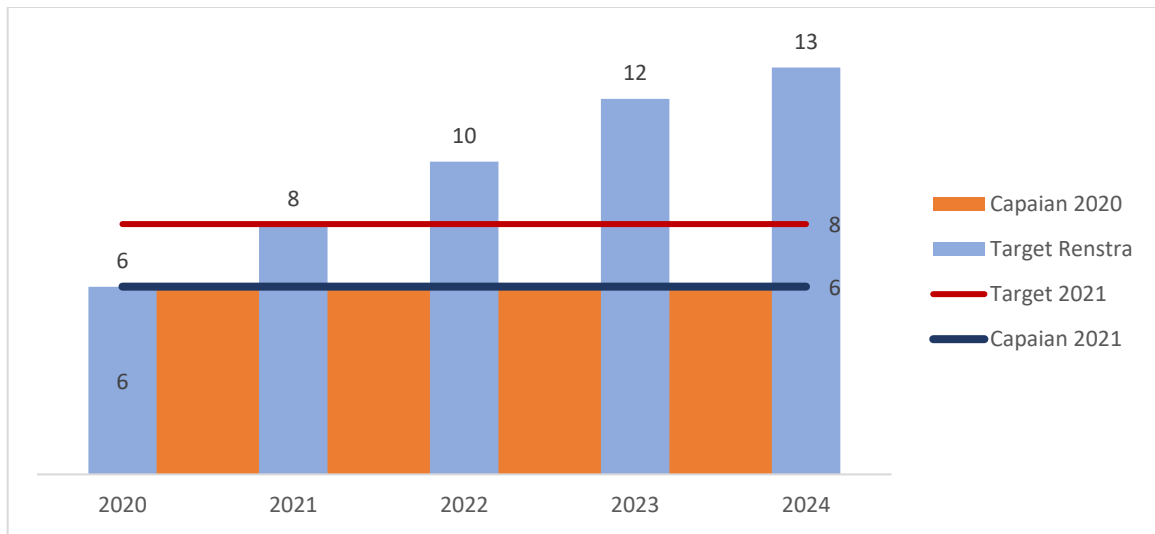
5.2. JUMLAH APIP KABUPATEN/KOTA DENGAN KAPABILITAS APIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas APIP \geq Level 3 (*Deliverd*) pada tahun pelaporan berdasarkan hasil *quality assurance*/panel di tingkat Kedeputan.

Realisasi tahun 2021 adalah 5 APIP atau mencapai 83,33% dari target tahun 2021 sebanyak 6 APIP, yaitu Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Inspektorat Kabupaten Balangan, Inspektorat Kota Banjarmasin, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan Inspektorat Kabupaten Banjar.

Sebagaimana telah dijelaskan pada indikator 5.1, indikator ini berbeda dengan indikator pada Renstra 2020-2024, sehingga untuk membandingkan capaiannya dengan capaian tahun lalu, indikator yang digunakan merupakan gabungan dari indikator 5.1 dan indikator 5.2 yang dapat ditunjukkan pada Grafik 3.10.

Grafik 3.10. Target dan Realisasi
Jumlah APIP Pemda Kapabilitas APIP \geq Level 3



Dari Grafik 3.10, jumlah Pemda dengan kapabilitas APIP \geq Level 3 sama dengan tahun 2020 dan telah mencapai 46,15% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Aktivitas yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja ini adalah:

1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP;
2. Bimbingan teknis Audit Kinerja Berbasis Risiko;
3. Melakukan kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri (Self Assessment) Kapabilitas APIP;
4. Melakukan kegiatan Bimbingan Pra QA atas Penilaian Mandiri (self assessment) Kapabilitas APIP; dan
5. Melakukan quality assurance atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3.

Faktor penghambat pencapaian target indikator kinerja adalah terdapat *refocusing* anggaran yang menghilangkan kegiatan pembinaan kapabilitas APIP Pemda. Sehubungan target dalam perjanjian kinerja revisi tidak berubah, kegiatan pembinaan kapabilitas APIP kemudian dilanjutkan kembali pada bulan November 2021, tetapi hal tersebut berakibat kegiatan ekspos hasil *quality assurance*/panel di tingkat Kedeputusan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2021.

Rencana tindak untuk mengejar ketertinggalan kinerja antara lain:

1. Memberikan atensi kepada Kepala Daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada kinerja APIP Daerah;
2. Melakukan diseminasi/sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lemabag/Pemerintah Daerah yang

menggantikan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP kepada APIP Daerah;

3. Mendorong APIP Daerah yang melakukan penilaian mandiri sesuai dengan ketentuan peningkatan kapabilitas APIP yang baru;
4. Melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas terhadap APIP yang pemenuhan KPA Level 3 nya sudah baik; dan
5. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dengan dengan Pimpinan APIP dan pejabat fungsional auditor melalui aplikasi whatsapp group.

5.3. JUMLAH PROVINSI DENGAN MATURITAS SPIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Provinsi dengan maturitas SPIP \geq Level 3 pada tahun pelaporan.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai skor 3,0375 atau mencapai 100% dari target sebanyak satu Pemerintah Provinsi.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini, antara lain sosialisasi dan bimtek Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SKPD di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Indikator ini berbeda dengan indikator pada Renstra 2020-2024, sehingga untuk membandingkan capaiannya dengan capaian tahun lalu, indikator yang digunakan merupakan gabungan dari indikator 5.3 dan indikator 5.4 yang dapat ditunjukkan pada Grafik 3.11.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya dukungan kegiatan *consulting* terkait SPIP yang dilakukan oleh BPKP kepada pemerintah daerah.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah memasukkan peningkatan maturitas SPIP level 3 dalam RPJMD dan mengadakan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

5.4. JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN MATURITAS SPIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP \geq Level 3 pada tahun pelaporan.

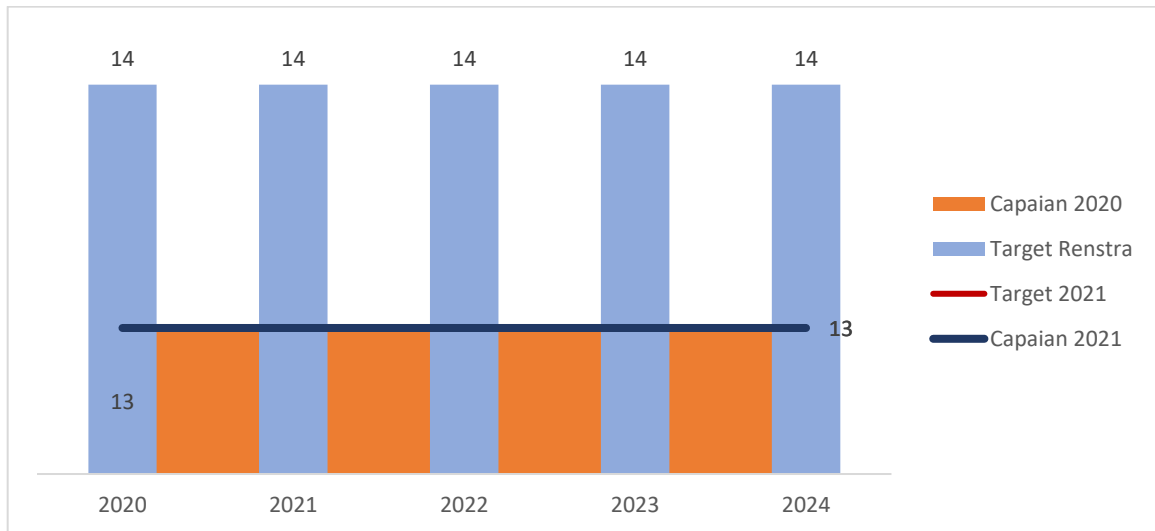
Realisasi tahun 2021 telah terdapat 12 pemerintah Kabupaten/Kota atau mencapai 100% dari target yang mencapai level maturitas SPIP Level 3, dengan rincian pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Rincian Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

NO.	PEMERINTAH DAERAH	SKOR MATURITAS SPIP
1	Kabupaten Balangan	3,0227
2	Kabupaten Banjar	3,0057
3	Kabupaten Barito Kuala	3,0000
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,0830
5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,0602
6	Kabupaten Kotabaru	3,0602
7	Kabupaten Tabalong	3,0375
8	Kabupaten Tanah Bumbu	3,0830
9	Kabupaten Tanah Laut	3,1205
10	Kabupaten Tapin	3,0375
11	Kota Banjarbaru	3,0602
12	Kota Banjarmasin	3,0807

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 antara lain Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Tanah Bumbu dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Manajemen Risiko (MR).

Sebagaimana dijelaskan pada indikator 5.3, indikator ini berbeda dengan indikator pada Renstra 2020-2024, sehingga untuk membandingkan capaiannya dengan capaian tahun lalu, indikator yang digunakan merupakan gabungan dari indikator 5.3 dan indikator 5.4 yang dapat ditunjukkan pada Grafik 3.11.

Grafik 3.11. Target dan Realisasi Jumlah dengan Pemda Maturitas SPIP \geq Level 3

Dari Grafik 3.11, jumlah Pemda dengan maturitas SPIP \geq Level 3 sama dengan Tahun 2020 dan telah mencapai 92,86% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024..

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya dukungan kegiatan *consulting* terkait SPIP yang dilakukan oleh BPKP kepada pemerintah daerah.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah memasukkan peningkatan maturitas SPIP level 3 dalam RPJMD dan mengadakan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

5.5. JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN MRI \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan jumlah pemerintah Kabupaten/Kota usaha dengan maturitas risiko indeks \geq Level 3 (*Defined*) pada tahun pelaporan.

Belum terdapat pemerintah daerah dengan manajemen risiko indeks mencapai Level 3. Namun, berdasarkan analisa tren skor *baseline* manajemen risiko indeks tahun 2020 dibandingkan dengan skor manajemen risiko indeks pada *baseline* maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2021, terdapat peningkatan sebagaimana pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Analisis Tren Manajemen Risiko Indeks 2020 dan 2021

NO	PEMERINTAH DAERAH	2020	2021	TURUN/NAIK (%)
1	Provinsi Kalimantan Selatan	1,700	2,684	57,88
2	Kota Banjarbaru	1,910	2,770	45,03
3	Kota Banjarmasin	2,520	2,979	18,21
4	Kab Barito Kuala	2,090	2,980	42,58

NO	PEMERINTAH DAERAH	2020	2021	TURUN/NAIK (%)
5	Kab Banjar	1,800	2,796	55,33
6	Kab Tapin	2,300	2,263	-1,61
7	Kab Tanah Laut	2,580	2,797	8,41
8	Kab Hulu Sungai Selatan	2,990	2,914	-2,54
9	Kab Hulu Sungai Tengah	1,720	2,860	66,28
10	Kab Hulu Sungai Utara	2,820	2,806	-0,50
11	Kab Balangan	2,080	2,831	36,11
12	Kab Tabalong	2,800	2,977	6,32
13	Kab Kotabaru	2,740	2,900	5,84
14	Kab Tanah Bumbu	1,510	2,517	66,69
			Rata-rata	28,66

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan $MRI \geq \text{Level } 3$ antara lain kegiatan *Coaching Clinic* Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP dan Penilaian Risiko pada Inspektorat Kabupaten Balangan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta *Coaching Clinic*.

Selain itu, terdapat kegiatan Pendampingan Penyusunan *Risk Register* SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan meningkatkan pemahaman peserta terkait evaluasi *Risk Register* SKPD dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Hasil pengawasan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hal yang perlu diperbaiki, yaitu masih terdapat pemerintah daerah yang belum memiliki kebijakan terkait manajemen/pengelolaan risiko.

Faktor penghambat capaian kinerja antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dalam melakukan pembinaan; dan
2. Pemerintah Daerah fokus pada penanganan dan pemulihan dampak Covid-19.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target antara lain:

1. Mendorong pemerintah daerah memasukkan peningkatan maturitas SPIP level 3 dan Manajemen Risiko dalam RPJMD; dan
2. Mengadakan bimtek penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.

5.6. JUMLAH DESA YANG MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah desa yang menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada tahun pelaporan.

Realisasi tahun 2021 sebanyak 1.863 desa atau mencapai 222,05% dari target 839 desa, dengan rincian pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Rincian Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH DESA
1.	Kab. Tanah Laut	130
2.	Kab. Kotabaru	198
3.	Kab. Banjar	277
4.	Kab. Barito Kuala	195
5.	Kab. Tapin	126
6.	Kab. Hulu Sungai Selatan	144
7.	Kab. Hulu Sungai Tengah	161
8.	Kab. Hulu Sungai Utara	214
9.	Kab. Tabalong	121
10.	Kab. Tanah Bumbu	144
11.	Kab. Balangan	153
Jumlah		1.863

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa antara lain bimtek penggunaan aplikasi Siskeudes dan pengelolaan keuangan desa asistensi persiapan implementasi Siskeudes *online*.

Indikator ini merupakan inovasi di tahun 2021 sehingga tidak tercantum pada Renstra 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun lalu ataupun dengan target 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh hampir seluruh desa di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa kepada aparatur desa secara regular dan peran bidang APD dalam melakukan asistensi serta *troubleshooting*.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja, antara lain melakukan bimtek keuangan desa secara regular dan mengoptimisasi forum komunikasi serta sinergi BPKP dengan seluruh DPMD di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

5.7. JUMLAH APIP YANG MENGIMPLEMENTASIKAN SISWASKEUDES

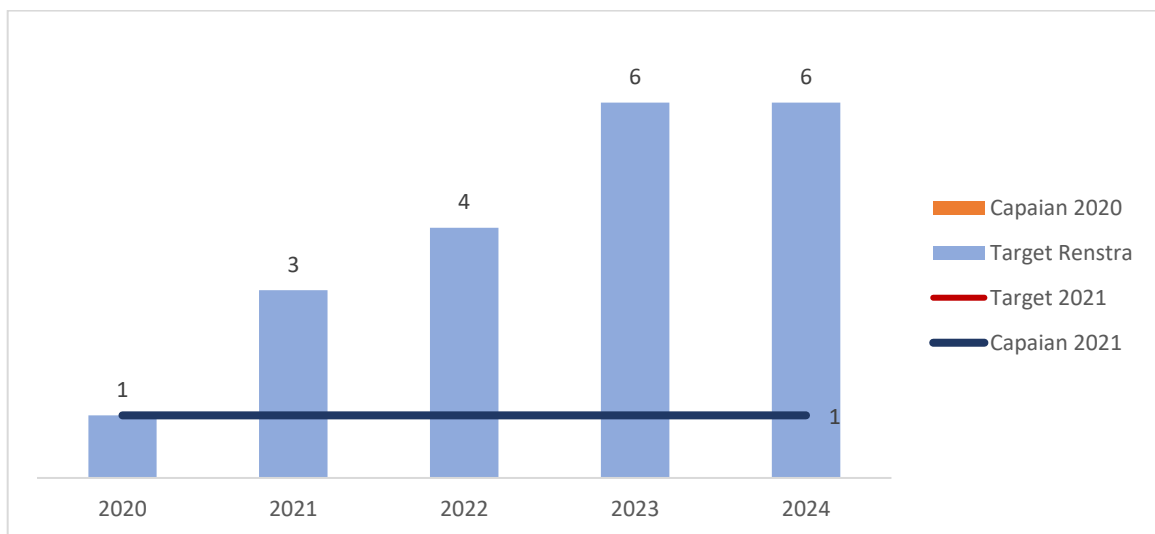
Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes pada tahun pelaporan.

Realisasi tahun 2021 sebanyak 1 APIP atau mencapai 100% dari target satu APIP, yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain adanya koordinasi antara Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, BPKP Pusat, dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sehingga proses *launching* implementasi aplikasi Siswaskeudes dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan realisasi Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Aplikasi Siswaskeudes tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 pada Grafik 3.12.

Grafik 3.12. Target dan Realisasi
Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Aplikasi Siswaskeudes



Dari Grafik 3.12, Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Aplikasi Siswaskeudes mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 16,67% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen baik Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan maupun Inspektorat untuk segera mengimplementasikan Aplikasi Siswaskeudes dalam menunjang pengawasan desa di Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Tindak dalam rangka peningkatan kinerja yang akan dilakukan melalui monitoring kesiapan pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi SDM di bidang APD dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal, dan melakukan sosialisasi dan bimtek Aplikasi Siswaskeudes kepada APIP.

5.8. PERSENTASE JUMLAH PEMDA YANG AKUNTABEL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA DAERAH

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan jumlah total pemda di seluruh Indonesia pada tahun pelaporan.

Realisasi tahun 2021 yaitu 3 Pemda atau mencapai 37,50% dari target 8 Pemda, dengan rincian pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17. Rincian Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

NO.	PEMERINTAH DAERAH	LKPD	SAKIP
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	WTP	BB
2.	Kab. Tanah Laut	WTP	B
3.	Kab. Kotabaru	WTP	B
4.	Kab. Banjar	WTP	B
5.	Kab. Barito Kuala	WTP	B
6.	Kab. Tapin	WTP	B
7.	Kab. Hulu Sungai Selatan	WTP	BB
8.	Kab. Hulu Sungai Tengah	WDP	B
9.	Kab. Hulu Sungai Utara	WTP	B
10.	Kab. Tabalong	WTP	B
11.	Kab. Tanah Bumbu	WTP	B
12.	Kab. Balangan	WTP	B
13.	Kota Banjarmasin	WTP	BB
14.	Kota Banjarbaru	WTP	B

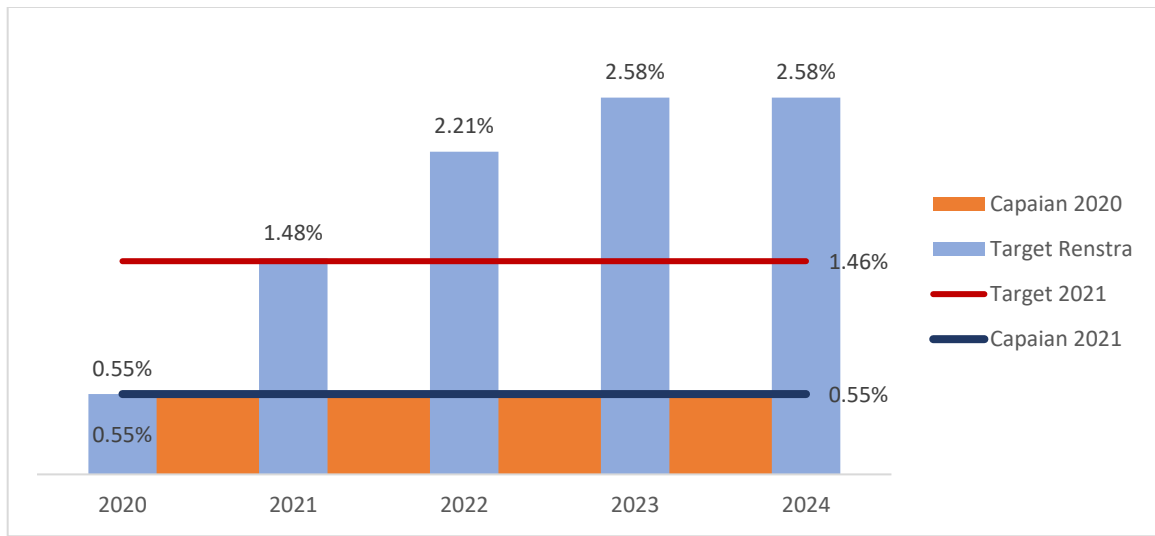
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain adalah 13 dari 14 Pemerintah Daerah telah mendapatkan opini WTP untuk tahun anggaran 2020 dan 3 Pemerintah Daerah memperoleh skor SAKIP BB dengan kategori Sangat Baik untuk tahun anggaran 2019, sedangkan hasil evaluasi SAKIP untuk tahun anggaran 2020 belum diperoleh.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain pendampingan/asistensi dalam rangka penyusunan LKPD, *updating* SIMDA keuangan, asistensi penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan FGD *troubleshooting* SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, dan SIMDA Pendapatan.

Satuan Indikator ini berbeda dengan satuan indikator pada Renstra 2020-2024. Untuk membandingkannya perlu dilakukan konversi terlebih dahulu sehingga perbandingannya sebagaimana disajikan pada Grafik 3.13.

Grafik 3.13. Target dan Realisasi

Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah



Dari Grafik 3.13, persentase jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah sama dengan tahun 2020 dan telah mencapai 21,22% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor penghambat capaian kinerja antara lain:

1. Pada tahun 2021, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan hanya melakukan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pada satu Pemerintah Daerah; dan
2. Adanya *refocusing* anggaran yang menyebabkan banyak aktivitas pengawasan berkurang.

Rencana tindak peningkatan capaian kinerja yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan bimbingan teknis/ pendampingan kepada Pemerintah Daerah;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMDA dalam rangka mempertahankan capaian opini;
3. Mengoptimalkan dan meningkatkan pemahaman SDM di bidang APD untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja; dan
4. Mengoptimalkan forum komunikasi antara BPKP dengan Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Selatan.

5.9. JUMLAH DESA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ASET DESA SECARA MEMADAI

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara mamadai pada tahun pelaporan.

Realisasi tahun 2021 terdapat 8 desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai atau mencapai 160% dari target sebanyak lima desa, dengan rincian pada Tabel 3.18.

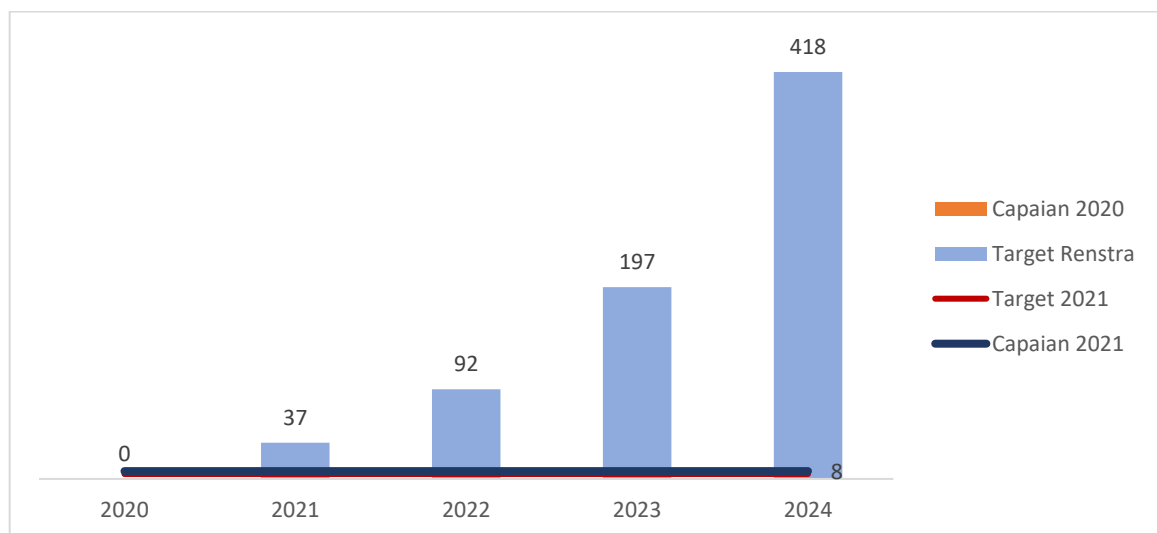
Table 3.18. Rincian Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

NO	KABUPATEN	JUMLAH DESA
1	Hulu Sungai Utara	4
2	Tanah Bumbu	4
Jumlah		8

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain melakukan evaluasi terhadap pengelolaan aset desa dan memberikan bimtek penatausahaan aset desa bagi aparatur desa.

Perbandingan realisasi jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset secara memadai tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 pada Grafik 3.14.

Grafik 3.14. Target dan Realisasi
Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset secara Memadai



Dari Grafik 3.14, jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset secara memadai mengalami peningkatan dari tahun 2020 tetapi baru mencapai 1,91% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Rencana Tindak dalam rangka peningkatan kinerja di antaranya melakukan bimbingan teknis pengelolaan aset desa, mengoptimalkan SDM di bidang APD dalam memberikan asistensi terhadap permasalahan-permasalahan di desa, dan mengoptimalkan forum komunikasi serta sinergi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan seluruh DPMD di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

PENGGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU memiliki rincian *output* dengan realisasi sebanyak 56 laporan atau sebanyak 100,00% dari target sebanyak 56 laporan, dengan dukungan realisasi dana Rp1.190.570.826 atau 100,01% dari anggaran Rp1.190.439.000 dan penggunaan SDM sebanyak 3.254 OH atau 85,83% dari rencana sebanyak 3.791 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran 5 belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 100,00% lebih kecil dari capaian penggunaan dana sebesar 100,01%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran 5 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 100,00% lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 85,83.



SASARAN KEGIATAN 6

MENINGKATNYA TATA KELOLA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan sebanyak 10 indikator kinerja (100%) telah tercapai sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
6.1	Nilai Skor Zona Integritas	Skor Skala 100	75,00	87,03	116,04	●
6.2	Skor IKPA	Skor Skala 100	95,00	96,96	102,06	●
6.3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Persen	95,00	100,00	105,26	●
6.4	Nilai Pengelolaan BMN	Nilai	80,00	89,36	111,70	●
6.5	Nilai SAKIP	Skor Skala 100	80,00	81,56	101,95	●
6.6	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00	●
6.7	Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	●
6.8	Persentase Penyelesaian RTP	Persen	100,00	100,00	100,00	●
6.9	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern	Persen	65,00	100,00	153,85	●
6.10	Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan BPKP	Indeks Skala 100	75,00	92,00	122,67	●

Uraian sepuluh indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

6.1. NILAI SKOR ZONA INTEGRITAS

Indikator ini diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Nomor S-1807/PW16/1/2021 tanggal 20 Desember 2021.

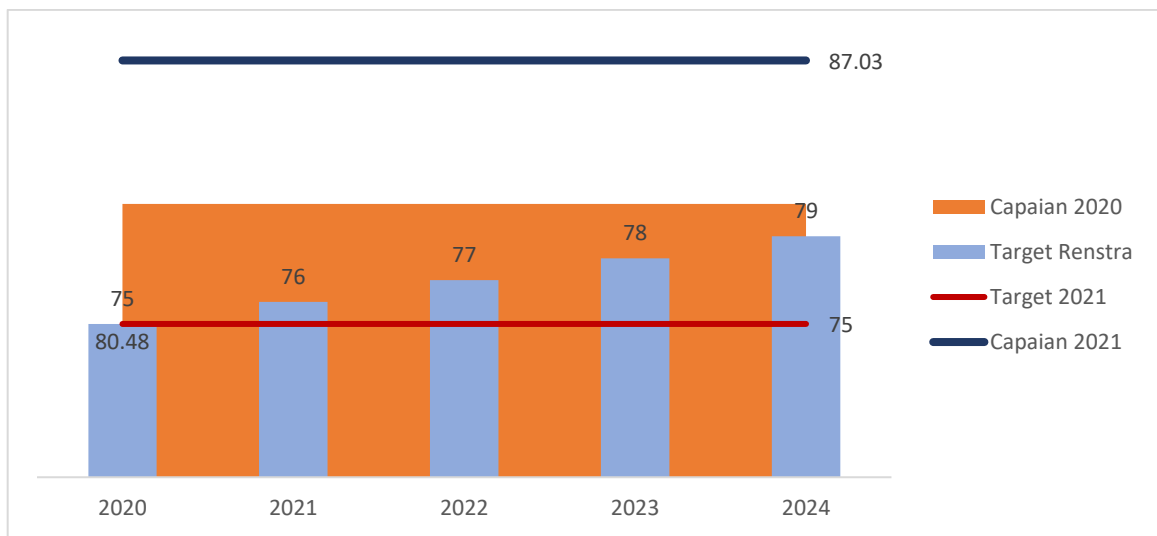
Realisasi nilai skor zona integritas unit kerja adalah 87,03 atau mencapai 116,04% dari target sebesar 75 dari skor skala 100, dengan rincian pada Tabel 3.20:

Tabel 3.20. Rincian Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

NO	ASPEK	SKOR
1	Proses	50,38
a	Manajemen Perubahan	6,38
b	Penataan Tata Laksana	5,79
c	Penataan Sistem manajemen SDM	9,19
d	Penguatan Akuntabilitas	10,00
e	Penguatan Pengawasan	11,81
f	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	7,22
2	Hasil	36,65
a	Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	19,40
b	Kualitas Pelayanan Publik	17,25
	Jumlah	87,03

Perbandingan realisasi nilai skor Zona Integritas unit kerja tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 pada Grafik 3.15.

Grafik 3.15. Target dan Realisasi Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja



Dari Grafik 3.15, nilai skor Zona Integritas unit kerja mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 110,16% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain adanya keteladanan pimpinan dan iklim kerja yang memungkinkan penerapan integritas oleh pegawai, adanya pembangunan kompetensi SDM secara terus menerus, dan penerapan sistem kendali mutu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja, yaitu dengan Menyusun rencana aksi dan pemantauan secara berkelanjutan atas pelaksanaannya dan melakukan pengembangan kompetensi pegawai terutama di lingkungan Bagian Tata Usaha.

6.2. SKOR IKPA

Indikator ini diukur berdasarkan hasil penilaian dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan pada tahun pelaporan.

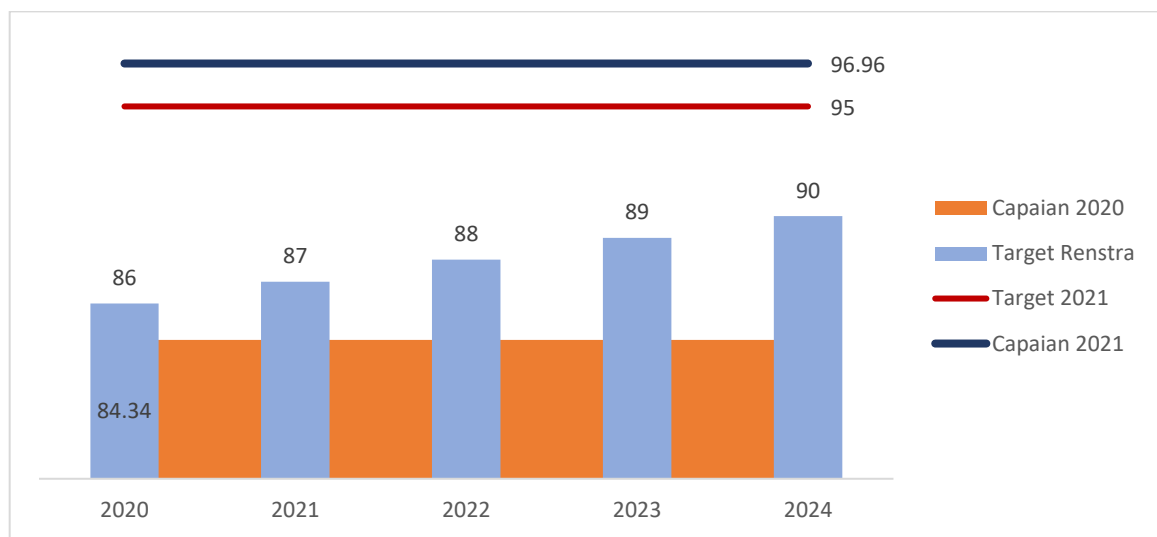
Realisasi Skor IKPA adalah sebesar 96,96 orang atau mencapai 102,06% dari target 95, dengan rincian pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21. Rincian Skor IKPA

NO	ASPEK	SKOR
1	Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan	94,51
2	Kepatuhan terhadap regulasi	100
3	Efektivitas pelaksanaan kegiatan	97,71
4	Efisiensi pelaksanaan kegiatan	90
Skor Akhir		96,96

Perbandingan Skor IKPA tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 pada Grafik 3.16.

Grafik 3.16. Target dan Realisasi Skor IKPA



Dari Grafik 3.16, Skor IKPA mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 107,73% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain dikarenakan koordinator perencanaan telah memberikan target waktu yang cukup untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan revisi anggaran, bendahara telah secara tertib dalam melakukan

penatausahaan keuangan, dan adanya dukungan pertanggungjawaban keuangan dari pelaksana kegiatan telah sesuai dan tepat waktu.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja, yaitu dengan merumuskan proyeksi penarikan dana bulanan secara lebih cermat dan melaksanakan pelaporan output atas realisasi kegiatan secara lebih tertib.

6.3. PERSENTASE PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAP

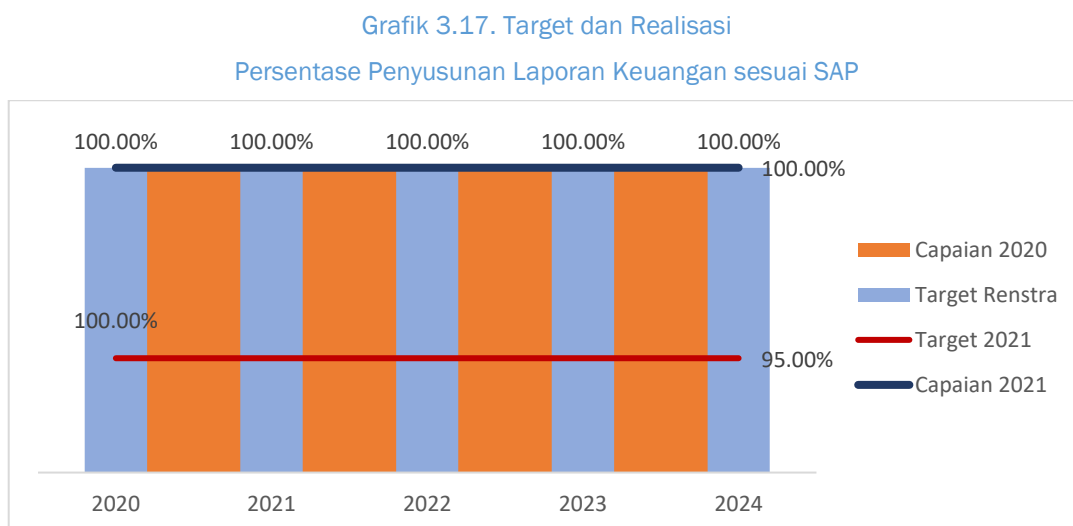
Indikator ini diukur dari jumlah penerbitan laporan keuangan pada tahun 2021 yang telah disajikan sesuai dengan SAP.

Realisasi persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP tahun adalah 100 atau mencapai 105,26% dari target sebesar 95, dengan rincian pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22. Rincian Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

NO	LAPORAN KEUANGAN	NOMOR	TANGGAL
1	Laporan Keuangan Tahun 2020 <i>unaudited</i>	LK-18/PW16/1/2021	3 Februari 2021
2	Laporan Keuangan Tahun 2020 <i>audited</i>	LK-87/PW16/1/2021	30 April 2021
3	Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021	LK-191/PW16/1/2021	30 Juli 2021
4	Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2021	LK-282/PW16/1/2021	13 Oktober 2021

Perbandingan persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 pada Grafik 3.17.



Dari Grafik 3.17, persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP sama dengan tahun 2020 dan telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain adanya saling koreksi antara penyusun laporan keuangan dengan petugas BMN yang mengurus persediaan dan belanja modal dan adanya pelatihan yang cukup dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAIBA.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah memperkuat koordinasi antara penyusun laporan keuangan, petugas BMN dan KPKNL pengampu barang.

6.4. NILAI PENGELOLAAN BMN

Indikator ini diukur berdasarkan Penilaian Mandiri (unit kerja) yang telah divalidasi oleh Biro Umum BPKP.

Realisasi tahun 2021 sebesar 89,36 atau mencapai 111,70% dari target 80 dengan rincian pada table 3.23:

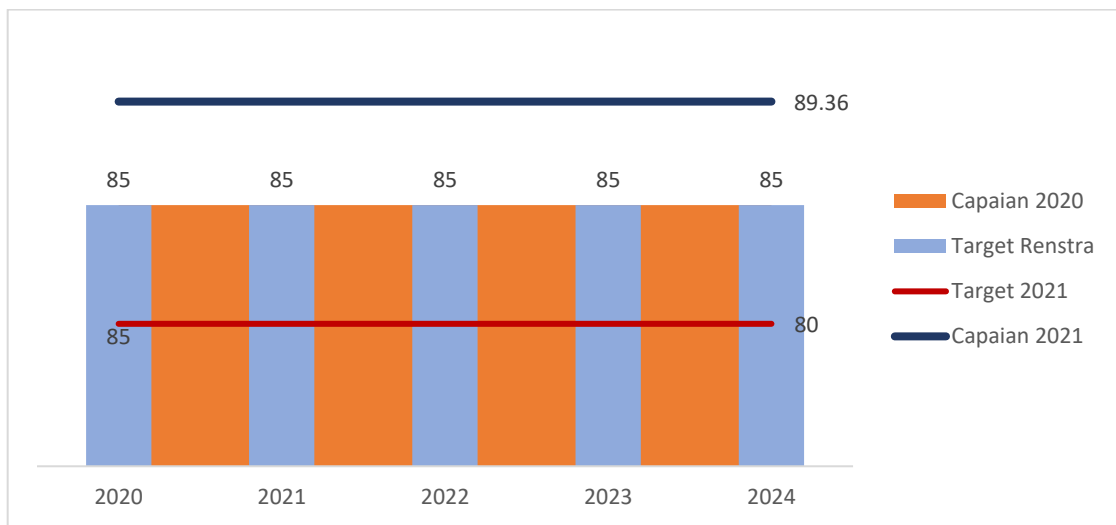
Table 3.23. Rincian Nilai Pengelolaan BMN

INDIKATOR PENILAIAN	REALISASI
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran belanja modal untuk tahun 2022 dan 2023 telah disampaikan tepat waktu	100
Penyampaian laporan bulanan tepat waktu	84
Penyampaian laporan triwulan penggunaan kandungan dalam negeri tepat waktu	58
Terdapat korelasi antara perencanaan BMN dalam RKA dengan Penyusunan RKBMN	100
Mengunggah Rencana Pengadaan dalam aplikasi SIRUP	50
Penyusunan rencana pengadaan dalam SIRUP dilakukan tepat waktu	100
Update perubahan revisi anggaran dalam aplikasi SIRUP	100
Rencana pengadaan telah di upload pada website BPKP Kalsel	100
Usulan PSP atas perolehan BMN atas BMN yang belum ditetapkan statusnya	100
Talah dilakukan perhitungan dan perjanjian atas BMN yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga	100
Tarif pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	100
Pembayaran PNBP atas pemanfaatan oleh pihak ketiga telah disetor ke Kas Negara secara tepat waktu	100
Pelaksanaan inventarisasi secara berkala	100
Pemberian sticker BMN sebagai pengamanan	100
Tersedianya catatan atau bukti penyerahan atas penggunaan barang-barang yang dimanfaatkan oleh pegawai	100
Tersedianya daftar pemeliharaan BMN	100
Tidak terdapat BMN dengan status idle	100
BMN idle telah dipindahtanggankan ke pengelola barang	100
BMN rusak berat telah di rubah kondisinya dan telah di reklas ke Aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	100
Pengajuan usulan persetujuan penghapusan terhadap barang dalam kondisi rusak berat	100
Update SIMAK BMN minimal kali dalam setahun	100
Update DBR minimal 1 tahun sekali	100

INDIKATOR PENILAIAN	REALISASI
Update SIP rumah negara	100
Penyusunan laporan BMN secara tepat waktu dan benar	100
Rekonsiliasi ADK SIMAK ke SAIBA setiap bulan	100
Pengiriman laporan wasdal secara tepat waktu	100

Satuan Indikator Nilai Pengelolaan BMN tahun 2021 berbeda dengan satuan Indikator Nilai Pengelolaan BMN yang tercantum pada Renstra tahun 2020-2024 yang menggunakan satuan predikat. Untuk membandingkannya perlu dilakukan konversi terlebih dahulu sehingga perbandingannya sebagaimana disajikan pada Grafik 3.18.

Grafik 3.18. Target dan Realisasi Nilai Pengelolaan BMN



Dari Grafik 3.18, nilai pengelolaan BMN mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 105,13% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain pencatatan data dan dokumen BMN secara lengkap dan pengidentifikasian BMN telah dilakukan dengan benar.

Rencana tindak ke depan meningkatkan kinerja antara lain dengan melakukan *update* SIRUP setelah ada Revisi Anggaran serta melakukan pengiriman laporan bulanan dan triwulan secara tepat waktu.

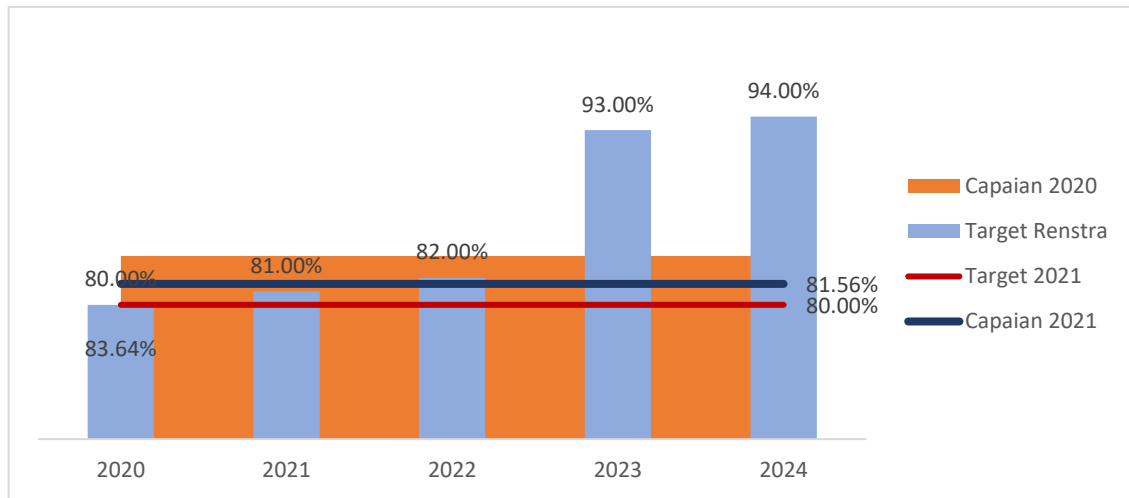
6.5. NILAI SAKIP

Indikator ini diukur berdasarkan hasil *quality assurance* implementasi SAKIP oleh Tim Inspektorat BPKP.

Realisasi nilai SAKIP adalah sebesar 81,56 atau mencapai 101,95% dari target nilai 80.

Perbandingan realisasi nilai Implementasi SAKIP tahun 2021 dengan target tahun 2021-2024 pada gambar 3.19.

Grafik 3.19. Target dan Realisasi Nilai SAKIP



Dari Grafik 3.19, nilai SAKIP mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dan telah mencapai 97,10% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja antara lain terdapat ukuran kinerja koordinator pengawasan bidang atau pejabat struktural eselon III dan eselon IV sebagai turunan kinerja atasannya dan terdapat pemantauan mengenai pencapaian kinerja.

Rencana tindak untuk mempertahankan kinerja yaitu dengan meningkatkan pemantauan dan pemanfaatan atas rencana aksi.

6.6. PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN PROFESI

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah pegawai yang telah mengikuti peningkatan kompetensi (Diklat, PPM, Workshop dll) dibandingkan jumlah pegawai yang ada.

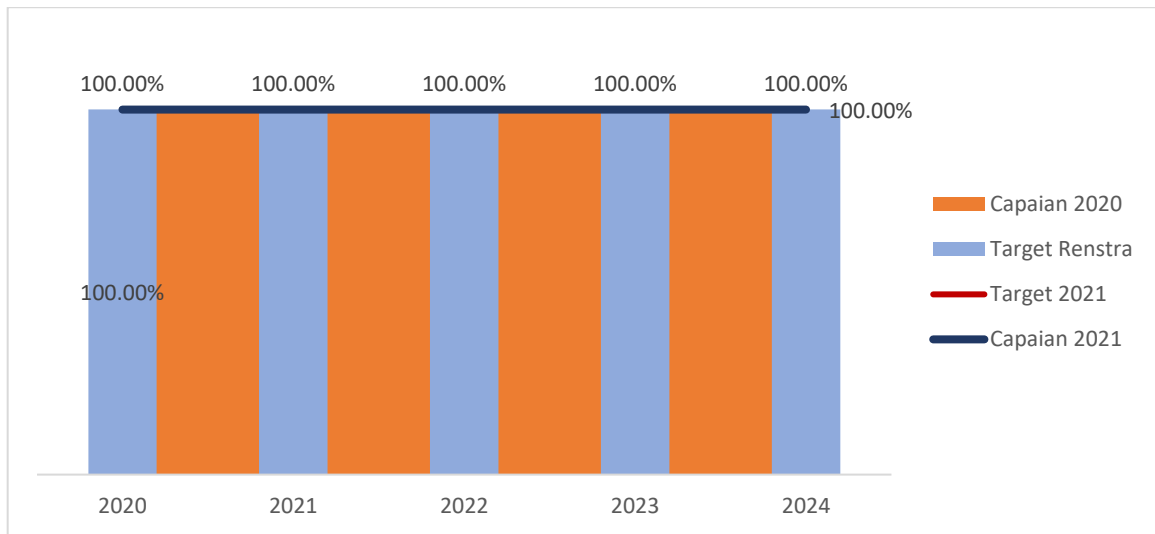
Pada tahun 2021 capaian pengembangan pegawai tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan rincian pada table 3.24:

Table 3.24. Rincian Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Profesi

PEGAWAI	DIKLAT	PPM	JUMLAH
Auditor	82	82	82
Non Auditor	11	28	28
Jumlah	93	110	110

Perbandingan realisasi persentase pegawai yang Mengikuti Pengembangan Profesi tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 pada Grafik 3.20.

Grafik 3.20. Target dan Realisasi
Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Profesi



Dari Grafik 3.20, persentase pegawai yang mengikuti pengembangan profesi sama dengan tahun 2020 dan telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain tersedianya diklat yang diselenggarakan secara online, intensifnya pelaksanaan PPM di lingkungan internal, dan adanya perkembangan penugasan yang menuntut keberagaman kompetensi sehingga memaksa pegawai untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja antara lain melakukan penetapan kompetensi minimal untuk setiap jenis dan penetapan rencana pengembangan kompetensi di awal tahun.

6.7. PERSENTASE ADMINISTRASI SDM YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah layanan administrasi SDM yang diberikan dibandingkan jumlah layanan yang diterima oleh Pegawai.

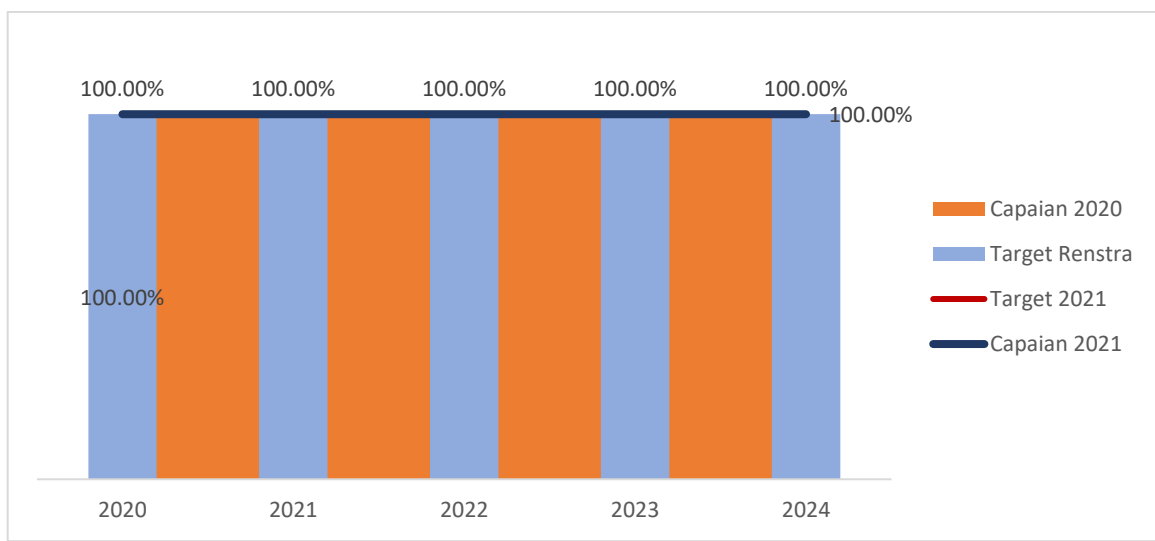
Realisasi tahun 2021 sebanyak 165 dokumen atau mencapai 100% dari target, dengan rincian pada table 3.25:

Table 3.25. Rincian Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan Tepat Waktu

NO	JENIS KEGIATAN	SEHARUSNYA	TERPROSES TEPAT WAKTU	TERLAMBAT
1	Kenaikan Gaji Berkala	51	51	0
2	Kenaikan Pangkat	22	22	0
3	Kenaikan Jabatan	4	4	0
4	Penyusunan angka kredit Auditor	88	88	0
Jumlah		165	165	0

Perbandingan realisasi persentase administrasi SDM yang diselesaikan Tepat Waktu tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 pada Grafik 3.21.

Grafik 3.21. Target dan Realisasi
Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan Tepat Waktu



Dari Grafik 3.21, persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu sama dengan tahun 2020 dan telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain dilaksanakannya Kenaikan Gaji Berkala maksimal dua bulan sebelumnya dan penggunaan aplikasi komputer untuk penyusunan angka kredit auditor dengan Aplikasi SIBIJAK.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah melakukan kenaikan pangkat secara *online* dan penggunaan TTE di aplikasi SIBIJAK sehingga dalam penerbitan SK PAK lebih cepat.

6.8. PERSENTASE PENYELESAIAN RTP

Indikator ini diukur dengan realisasi tindak pengendalian dibandingkan daftar rencana tindak yang telah disusun.

Realisasi tahun 2021 telah dilaksanakan 28 tindak pengendalian dari 28 yang ditetapkan sebagai tindak pengendalian atau 100%, dengan rincian pada table 3.26.

Tabel 3.26. Rincian Persentase Penyelesaian RTP

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Resiko teridentifikasi	24
2	Penyebab teridentifikasi	25
3	Rencana tindak pengendalian	28
4	Realisasi tindak pengendalian	28

Indikator ini merupakan inovasi di tahun 2021 sehingga tidak tercantum pada Renstra 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun lalu ataupun dengan target 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain adanya komitmen dari seluruh pemilik resiko untuk melaksanakan tindak pengendalian yang telah direncanakan dan adanya pemantauan oleh Pimpinan.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja antara lain dengan melakukan identifikasi dan mitigasi resiko sesuai tugas yang akan dilaksanakan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan menyusun rencana tindak pengendalian serta melakukan monitoring pelaksanaannya.

6.9. PERSENTASE EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN

Indikator ini diukur dengan penurunan dampak dan frekuensi (level risiko) atas risiko yang teridentifikasi.

Realisasi tahun 2021 sebanyak 100% atau mencapai 153,85% dari target sebanyak 65%, dengan rincian pada table 3.27.

Tabel 3.27. Rincian Persentase Efektivitas Pengendalian Intern

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Resiko teridentifikasi dan dimitigasi	24
2	Jumlah resiko yang menurun level risiko setelah dilakukan pengendalian intern	24

Indikator ini merupakan inovasi di tahun 2021 sehingga tidak tercantum pada Renstra 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan capainnya dengan tahun lalu ataupun dengan target 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah pemilik resiko telah melaksanakan tindak pengendalian sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja antara lain melaksanakan identifikasi resiko dengan cermat, melakukan analisis penyebab resiko, menyusun rencana tindak pengendalian, dan melaksanakan tindak pengendalian.

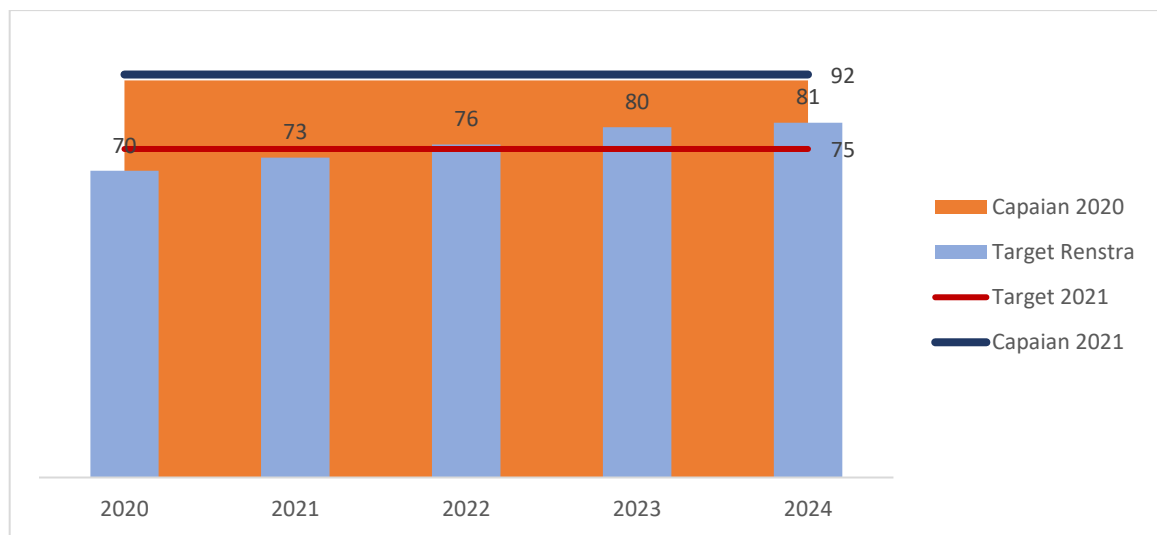
6.10. INDEKS KEPUASAN LAYANAN PERWAKILAN

Indikator ini diukur berdasarkan survei yang dilakukan kepada mitra kerja yang menerima layanan tahun 2021. Periode yang disurvei adalah atas layanan yang diberikan selama Januari-Desember 2021.

Hasil survei menunjukkan nilai kepuasan sebesar 92,00 atau mencapai 122,67% dari target sebanyak 75,00.

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan tahun 2021 dengan target tahun 2020-2024 pada Grafik 3.22.

Grafik 3.22. Target dan Realisasi
Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan



Dari Grafik 3.22, Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 113,58% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain kualitas layanan yang diberikan telah memenuhi harapan mitra kerja dan kompetensi SDM yang melaksanakan tugas pengawasan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Rencana tindak peningkatan capaian kinerja antara lain melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua fokus penilaian secara berkala dan mendokumentasikan dalam rangka perbaikan yang berkelanjutan, serta melakukan perbaikan berupa pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan secara otomatis/ *online*.

PENGGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja memiliki rincian *output* dengan realisasi sebanyak 2 layanan dan 392 unit atau sebanyak 100,00% dari target sebanyak 2 layanan dan 392 unit, dengan dukungan realisasi dana Rp21.146.257.038 atau 99,90% dari anggaran Rp21.188.572.000 dan penggunaan SDM sebanyak 6.636 OH atau 100,00% dari rencana sebanyak 6.636 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran 6 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 100,00% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,90%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran 6 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *output* sebesar 100,00% sama dengan capaian penggunaan SDM sebesar 85,83.

B. Inovasi Kinerja Lainnya

1. INOVASI KINERJA DI LUAR PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa indikator kinerja tahun 2021 yang merupakan inovasi dan tidak direncanakan pada perencanaan strategis 2020-2024 tetapi menjadi salah satu bentuk kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain:

a. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target

Indikator ini terdapat pada Renstra 2020-2024 tetapi memiliki target sebesar 0 PSN dalam 5 tahun. Akan tetapi pada tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan membuat target atas indikator ini menjadi 1 PSN dan telah berhasil mencapainya dengan capaian sebesar 100%.

b. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Diawasi

Indikator ini tidak terdapat pada Renstra 2020-2024. Akan tetapi menjadi indikator kinerja pada tahun 2021 dengan target sebesar 4 PSN dan berhasil dicapai 100%.

c. Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Indikator ini tidak terdapat pada Renstra 2020-2024. Akan tetapi menjadi indikator kinerja pada tahun 2021 dengan target sebesar 839 desa dan berhasil dicapai 218,83%.

d. Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah.

Indikator ini terdapat pada Renstra 2020-2024 namun mengalami perubahan cara perhitungan pada tahun 2021 sehingga dapat lebih mencerminkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

e. Nilai Pengelolaan BMN

Indikator ini terdapat pada Renstra 2020-2024 namun mengalami perubahan cara perhitungan pada tahun 2021 sehingga dapat lebih mencerminkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

f. Persentase Penyelesaian RTP

Indikator ini tidak terdapat pada Renstra 2020-2024. Akan tetapi menjadi indikator kinerja pada tahun 2021 dengan target sebesar 100% dan telah berhasil dicapai 100%.

g. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern

Indikator ini tidak terdapat pada Renstra 2020-2024. Akan tetapi menjadi indikator kinerja pada tahun 2021 dengan target sebesar 100% dan telah berhasil dicapai 100%.

2. INOVASI KINERJA DI LUAR PERENCANAAN KINERJA

Selain kinerja pengawasan dan dukungan pengawasan yang diuraikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan kinerja lainnya, antara lain:



a. Dukungan percepatan vaksinasi

Atas inovasi ini, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendapat Penghargaan Ucapan Terima Kasih oleh Walikota Banjarbaru atas Dukungan dan Partisipasi Dalam Pelaksanaan Vaksinasi dan Penanganan Covid-19 di Kota Banjarbaru;

- b. Memberikan fasilitas layanan PCR kepada masyarakat bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Melakukan reformasi ruang kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjadi *open working space*;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan sehingga mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat Terbaik III Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020;
- e. Meningkatkan layanan tata usaha yang ditunjukkan dengan nilai indeks kepuasan layanan tata usaha sebesar 81,64.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 Rp24.233.607.074,00 atau terserap 99,56% dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 Rp24.340.652.000,00.

Rincian per jenis belanja dan per program pada Tabel 3.28 sampai dengan Tabel 3.30.

Tabel 3.28. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 Menurut Jenis Belanja

NO.	JENIS BELANJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Belanja Pegawai	16.942.674.000	16.929.017.844	99,92%
2	Belanja Barang	6.267.478.000	6.174.431.830	98,52%
3	Belanja Modal	1.130.500.000	1.130.157.400	99,97%
	Jumlah	24.340.652.000	24.233.607.074	99,56%

Tabel 3.29. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 Menurut Program/ Kegiatan

NO.	JENIS BELANJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	Program Dukungan Manajemen			
1	Layanan Perkantoran	19.582.804.000	19.543.556.434	99,80%
2	Layanan Umum	475.268.000	472.543.204	99,43%
3	Layanan Sarana Internal	301.500.000	301.159.400	99,89%
4	Layanan Prasarana Internal	829.000.000	828.998.000	100,00%
	Jumlah Program	21.188.572.000	21.146.257.038	99,80%
II	Program Pengawasan Pembangunan			
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA	12.000.000,00	11.670.000,00	97,25%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	300.380.000,00	299.950.801,00	99,86%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	197.900.000,00	197.528.178,00	99,81%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK	150.276.000,00	148.992.000,00	99,15%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK	207.662.000,00	206.240.434,00	99,32%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK	54.197.000,00	53.845.000,00	99,35%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang PKD	611.333.000,00	609.033.926,00	99,62%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang PKD	268.799.000,00	268.551.050,00	99,91%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang PKD	255.125.000,00	258.630.350,00	101,37%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang AN	297.545.000,00	291.779.139,00	98,06%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha Pembangunan Bidang AN	148.680.000,00	146.458.398,00	98,51%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang AN	31.347.000,00	31.275.000,00	99,77%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi	261.719.000,00	254.408.947,00	97,21%

NO.	JENIS BELANJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi Bidang Investigasi	134.320.000,00	131.229.200,00	97,70%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan Kapabilitas APIP	43.182.000,00	42.685.500,00	98,85%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional	177.615.000,00	177.059.100,00	99,69%
	Jumlah Program	3.152.080.000	3.129.337.023	99,28%
	Total Anggaran dan Realisasi	24.340.652.000	24.275.594.061	99,73%

Tabel 3.30. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 Menurut Sasaran Kegiatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	448.492.000,00	425.893.574,00	94,96
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	205.036.776,00	96.430.000,00	47,03
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	269.698.214,00	259.785.269,00	96,32
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	115.472.000,00	112.560.000,00	97,48
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	677.676.642,00	532.580.625,00	78,59
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	23.886.400.000	23.531.556.589	98,51%
	Jumlah	26.414.076.000	25.991.379.426	98,40%



BAB IV PENUTUP

CLOSING

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai sasaran kegiatan tahun 2021 juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan.

Beberapa perbaikan mendasar dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja terhadap proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Secara umum, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai kinerja sebagaimana ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan realisasi Indikator Kinerja yang mencapai/ melebihi target sebanyak 27 indikator (90%) dari 30 indikator yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Kegiatan 1	IK 1 tercapai 14.238,22%
	IK 2 tercapai 112.402,20%
	IK 3 tercapai 208,09%
	IK 4 tercapai 1.626,73%
Sasaran Kegiatan 2	IK 1 tercapai 100,00%
	IK 2 tercapai 100,00%
Sasaran Kegiatan 3	IK 1 tercapai 110,00%
	IK 2 tercapai 100,00%
	IK 3 tercapai 188,00%
Sasaran Kegiatan 4	IK 1 tercapai 100,00%
	IK 2 tercapai 133,33%
Sasaran Kegiatan 5	IK 1 tercapai 100,00%
	IK 2 tercapai 83,33%
	IK 3 tercapai 100,00%
	IK 4 tercapai 100,00%
	IK 5 tercapai 0,00%
	IK 6 tercapai 222,05%
	IK 7 tercapai 100,00%
	IK 8 tercapai 37,50%
	IK 9 tercapai 160,00%
Sasaran Kegiatan 6	IK 1 tercapai 116,04%
	IK 2 tercapai 102,06%
	IK 3 tercapai 105,26%
	IK 4 tercapai 111,70%
	IK 5 tercapai 101,95%
	IK 6 tercapai 100,00%
	IK 7 tercapai 100,00%
	IK 8 tercapai 100,00%
	IK 9 tercapai 153,85%
IK 8 tercapai 122,67%	

Meskipun begitu, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai sesuai dengan target. Hal ini merupakan tugas ke depan dalam memperbaiki kinerja yang belum tercapai dan sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi yang telah tercapai.

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang terhadap Indikator Kinerja yang belum mencapai target, antara lain:

1. Memberikan atensi kepada Kepala Daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada kinerja APIP Daerah dengan;
2. Melakukan diseminasi/sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lemabag/Pemerintah Daerah yang menggantikan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP kepada APIP Daerah;
3. Mendorong APIP Daerah yang melakukan penilaian mandiri sesuai dengan ketentuan peningkatan kapabilitas APIP yang baru;
4. Melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas terhadap APIP yang pemenuhan KPA Level 3 nya sudah baik;
5. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dengan dengan Pimpinan APIP dan pejabat fungsional auditor melalui aplikasi *whatsapp group*;
6. Mendorong pemerintah daerah memasukkan peningkatan maturitas SPIP level 3 dan MR dalam RPJMD;
7. Mengadakan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan Kapabilitas APIP;
8. Melakukan bimbingan teknis/pendampingan kepada Pemerintah Daerah terkait peningkatan tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko;
9. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMDA dalam rangka mempertahankan capaian opini;
10. Mengoptimalkan dan meningkatkan pemahaman SDM di bidang APD untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja; dan
11. Mengoptimalkan forum komunikasi antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Selatan.

(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)



KILAS PERISTIWA



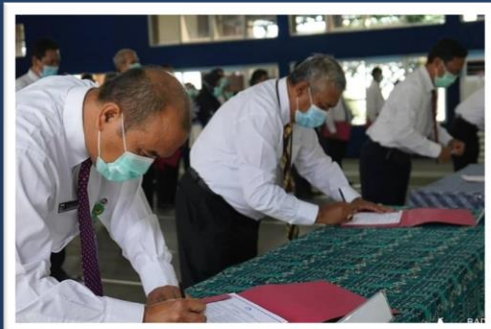
17 JANUARI 2021

Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan berupa paket sembako, obat-obatan, makanan ringan dan peralatan sanitasi



20 JANUARI 2021

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan paket sembako dan makanan ringan kepada warga yang terdampak korban banjir



25 JANUARI 2021

Penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



4 MARET 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri undangan Biro Rencana dan Anggaran Polda Kalsel dalam rangka pencanangan Pembangunan Zona Integritas



10 MARET 2021

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Auditor Madya dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Herman Hermawan dan dihadiri oleh Para Pejabat Struktural, Koordinator Pengawasan



16 MARET 2021

Vaksinasi Covid 19 dosis pertama pada pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Aula Poltekkes Kota Banjarbaru



18 MARET 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Bpk. Herman Hermawan mengunjungi Proyek Pembangunan Pendidikan SBSN Kampus 2 UIN Antasari Banjarmasin



22 MARET 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Herman Hermawan yang didampingi oleh Korwas Bidang APD melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah



30 MARET 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Herman Hermawan menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2020 kepada Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal



31 MARET 2021

Pelepasan Purnabakti Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Herman Hermawan dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Wina Safarina Herman



19 APRIL 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Korwas Bidang Investigasi Ngatno menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan



20 APRIL 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap melakukan kunjungan kerja ke Komando Resor Militer (Korem) 101 Antasari



23 APRIL 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap melakukan kunjungan kerja ke BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan



25 APRIL 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap melakukan kunjungan kerja ke Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



26 APRIL 2021

Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap oleh Pj Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal yang dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), Dadang Kurnia



27 APRIL 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap menerima kunjungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru



26 APRIL 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan



28 APRIL 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap memimpin pengambilan sumpah PNS dan pengambilan sumpah jabatan Pranata APBN Terampil di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan



05 MEI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap menghadiri Pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dan Pengukuhan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Darmuji



05 MEI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap melakukan kordinasi Selatan, Rudy M. Harahap melakukan kordinasi penegakan hukum dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan



05 MEI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, melakukan koordinasi pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II



17 MEI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap beserta seluruh pegawai mengikuti halal bi halal dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H



24 MEI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menghadiri Rakorwasinkeubang yang dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia



25 MEI 2021

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penanaman pohon di lahan kantor dalam rangka peringatan HUT BPKP ke-38



31 MEI 2021

Upacara memperingati HUT ke-38 BPKP dengan Kepala perwakilan BPKP kalsel Rudy M. Harahap bertindak sebagai inspektur upacara



7 JUNI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap melakukan kunjungan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Mokhammad Hilman



10 JUNI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap menerima kunjungan dari IAI Wilayah Kalimantan Selatan dalam rangka mengundang dalam acara Pelantikan IAI Wilayah Kalimantan Selatan



17 JUNI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap melakukan kunjungan dalam rangka evaluasi optimalisasi PAD Kabupaten Tabalong



22 JUNI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap mengenalkan New SPIP ketika menjadi narasumber di Focus Group Discussion (FGD) secara virtual yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan



02 JULI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap menghadiri pelepasan Bekantan dan penanaman kopi Liberika di Kabupaten Barito Kuala



21 JULI 2021

Perwakilan Prov. BPKP kalsel telah melaksanakan pemotongan hewan kurban di halaman belakang Kantor



21 JULI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap menghadiri rapat Penyaluran Bantuan Beras PPKM tahun 2021



29 JULI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudy M. Harahap berkunjung ke Bendungan Tapin yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai dibangun pada tahun 2015



30 JULI 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, menyampaikan hasil Evaluasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Safrizal ZA di dampingi Ketua DPRD Supian HK



12 AGUSTUS 2021

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap mengikuti rekaman TVRI untuk mendorong masyarakat Kalimantan Selatan membudidayakan tanaman kopi



12 AGUSTUS 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap menghadiri Rapat Paripurna DPRD



17 AGUSTUS 2021

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap menghadiri upacara peringatan HUT RI ke-76 dan di hadiri oleh Pj. Gubernur Kalsel, Safrizal ZA selaku inspektur upacara



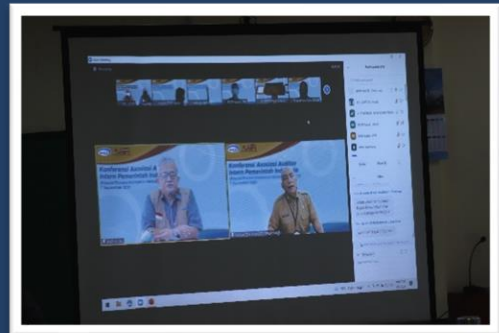
23 AGUSTUS 2021

Labkesda Kalsel bekerja sama dengan BPKP Kalsel mulai melakukan uji coba layanan Drive-Thru untuk tes PCR dan rapid antigen



01 SEPTEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap menghadiri Rapat Perencanaan Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan di ruang rapat Walikota Banjarbaru



7 SEPTEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus AAIPi Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2021-2024



13 SEPTEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap dampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bersama rombongan untuk kunjungan ke Suku Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan



22 SEPTEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap meninjau langsung pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 sektor jasa keuangan di Gedung Murakata Barabai



24 SEPTEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap berkunjung ke Pelabuhan Trisakti. Dalam kegiatan tersebut dihadiri juga KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. Ambapers, Pelindo



09 OKTOBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap melantik Pejabat Struktural Subkoordinator Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum



11 OKTOBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap memberikan orasi ilmiah kepada ratusan wisudawan dan wisudawati di Politeknik Negeri Tanah Laut



11 OKTOBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Kalsel turut memantau pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat



14 OKTOBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy Mahani melakukan koordinasi terkait pekerjaan penanganan tanggap darurat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



18 OKTOBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menghadiri acara pertemuan ahli dalam rangka peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan



22 OKTOBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap melakukan kunjungan ke Kabupaten Tapin dan disambut oleh Bupati Tapin M. Arifin Arpan



25 OKTOBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap didaulat menjadi narasumber dalam kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Tanah Laut



02 NOVEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap melakukan silaturahmi dengan Bupati Tanah Laut H. Sukamta sekaligus kunjungan kerja ke lokasi Kawasan Industri Jorong



04 NOVEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap melakukan bincang santai dengan Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar



04 NOVEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Optimalisasi atas Implementasi BLUD pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru



05 NOVEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap melakukan bincang santai dengan Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif



07 NOVEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap bertemu dengan Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Blucer Wellington Rajagukguk



10 NOVEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap menerima kunjungan dari Kepala BPK Perwakilan (Kalan) Provinsi Kalimantan Selatan, M. Ali Asyhar



16 NOVEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap menerima kunjungan dari Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Aulia Oktafiandi



26 NOVEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap membuka FGD Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



01 DESEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap menerima audiensi aparat pemerintah dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di kantor Perwakilan BPKP Kalsel



14 DESEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap menjadi narasumber tentang Mitigasi Dampak Bencana dan alternatif Prosedur Penanganan PBJ Darurat yang diselenggarakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Selatan



16 DESEMBER 2021

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap membuka acara Quality Assurance dalam rangka pemenuhan pencapaian kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Kotabaru



24 DESEMBER 2021

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kesepahaman dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 SASARAN KEGIATAN STRATEGIS
- LAMPIRAN 2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
- LAMPIRAN 3 TARGET DAN REALISASI *OUTCOME*
- LAMPIRAN 4 PERBANDINGAN REALISASI *OUTCOME*
- LAMPIRAN 5 TARGET DAN REALISASI RINCIAN *OUTPUT*
- LAMPIRAN 6 PERBANDINGAN REALISASI RINCIAN *OUTPUT*
- LAMPIRAN 7 RINCIAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
- LAMPIRAN 8 RINCIAN BADAN USAHA DENGAN KINERJA SEHAT
- LAMPIRAN 9 RINCIAN MATURITAS SPIP, TINGKAT KAPABILITAS APIP, MR, DAN IEPK PEMDA



SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi (jutaan rupiah)	300	750	1.000	1.500	2.000	
	Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi (jutaan rupiah)	108	259	324	388	453	
	Nilai potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi (jutaan rupiah)	500	1.000	1.500	2.000	2.400	
	Nilai potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi (jutaan rupiah)	216	432	540	647	755	
	Nilai efisiensi pengeluaran pemerintah daerah (jutaan rupiah)	-	185.428	152.978	134.621	111.062	
	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah (jutaan rupiah)	1.123	1.351	1.509	1.649	1.868	
	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah (jutaan rupiah)	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982	
	Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer	-	118	120	122	125	
	Nilai penyelamatan pembiayaan daerah	-	59	60	61	62	
	Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional dan Daerah	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	0	2	0	0	0
Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi		7	7	7	7	7	
Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target		7	7	7	7	7	
Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target		0	1	1	1	1	
Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik		0,00%	25,00%	31,25%	37,50%	50,00%	
Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan		75%	80%	85%	85%	85%	
Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha		Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	0	0	0	1	3
		Persentase BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	17,65%
	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	10	10	11	11	12	
	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	43,48%	43,48%	47,83%	47,83%	52,17%	
	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	2	2	2	2	2	
	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	24	31	38	47	53
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil Pengawasan refresif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	0	0	2	3	4
	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	0	0	0	1	2
	Jumlah APiP Pemda dengan Kapabilitas APiP \geq Level 3	6	8	10	12	13
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern pada Pemda dan Badan Usaha	Persentase APiP Pemda dengan Kapabilitas APiP \geq Level 3	42,86%	57%	71%	86%	93%
	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	14	14	14	14	14
	Persentase Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	0	0	0	1	1
	Persentase Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	0%	0%	0%	100,00%	100,00%
	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	1	3	4	5	7
	Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	7,69%	23,08%	30,77%	38,46%	53,85%
	Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	0,55%	1,48%	2,21%	2,58%	2,58%
	Jumlah rekomendasi strategis (<i>policy brief</i>) kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1
	Persentase desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa	40%	44,99%	50,03%	55,01%	60%
	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset secara memadai	0	37	92	197	418
	Jumlah APiP yang mengimplementasikan aplikasi Siswaskeudes	1	3	4	6	6
	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	0	0	0	0	1
	Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	0	0	1	1	3

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase BUMD dengan MRI \geq Level 3	0,00%	0,00%	5,88%	5,88%	17,65%
	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	0	0	2	3	4
	Persentase BLUD dengan MRI \geq Level 3	0,00%	0,00%	12,50%	18,75%	25,00%
	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0	0	0	1	3
	Persentase BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	17,63%
	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0	0	0	0	1
	Persentase BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Nilai Skor Zona Integritas	75	76	77	78	79
	Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyusunan RKA tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran	86	87	88	89	90
	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	90%	91%	92%	93%	95%
	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai pengelolaan BMN	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Nilai implementasi SAKIP	80	81	82	83	84
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
	Indeks Manajemen Risiko	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
	Indeks kepuasan layanan ketatausahaan	70	76	80	81	82
	Indeks kepuasan layanan Perwakilan BPKP	70	73	76	80	81

KINERJA PERWAKILAN BPKP

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
I Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah						
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	518	73.754	14.238,22	●
1.2	Nilai Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	863	970.031	112.402,20	●
1.3	Nilai efisiensi pengeluaran Negara dan daerah	Rupiah (Juta)	186.546	388.191	208,09	●
1.4	Nilai penyelamatan keuangan Negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1.560	25.377	1.626,73	●
II Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1	1	100,00	●
2.2	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang diawasi	PSN	4	4	100,00	●
III Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						
3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	10	11	110,00	●
3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BUMD	1	1	100,00	●
3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	25	47	188,00	●
IV Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	●
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	75	100	133,33	●
V Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	●
5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	6	5	83,33	●
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	●
5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	12	12	100,00	●
5.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	1	0	0,00	●
5.6	Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Desa	839	1863	222,05	●
5.7	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	1	100,00	●

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
5.8	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	8	3	37,50	●
5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan asset desa secara memadai	Desa	5	8	160,00	●
VI	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja					
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	87,03	116,04	●
6.2	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95	96,96	102,06	●
6.3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen	95	100	105,26	●
6.4	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	80	89,36	111,70	●
6.5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	80	81,56	101,95	●
6.6	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persen	100	100	100,00	●
6.7	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100,00	●
6.8	Persentase penyelesaian RTP	Persen	100	100	100,00	●
6.9	Persentase efektivitas pengendalian intern	Persen	65	100	153,85	●
6.10	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	92	122,67	●

Keterangan:

- = mencapai/ melampaui target;
- = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu;
- = belum mencapai target

TARGET DAN REALISASI OUTCOME

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021			KEUANGAN			SDM (OH)			
				TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	518,00	73.754,00	14.238,22						
		1.2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp (Juta)	863,00	970.031,00	112.402,20						
		1.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	186.546,00	388.191,00	208,09						
		1.4	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp (Juta)	1.560,00	25.377,00	1.626,73						
				Capaian Rata-Rata		32.118,81	498.280.000,00	497.478.979,00	99,84	3.452	3.317	96,09	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1	1	100,00						
		2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang diawasi	PSN	4	4	100,00						
				Capaian Rata-Rata		100,00	589.750.000,00	586.136.534,00	99,39	3.031	2.793	92,15	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMN	10	11	110,00						
		3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	1	100,00						
		3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	25	47	188,00						
				Capaian Rata-Rata		99,50	477.572.000,00	469.512.537,00	98,31	1.764	1.476	83,67	
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00						
		4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	75,00	100,00	133,33						
				Capaian Rata-Rata		116,67	396.039.000,00	385.638.147,00	97,37	1.100	1.784	162,18	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Prov	1	1	100,00						
		5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/Kota	6	5	83,33						
		5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Prov	1	1	100,00						
		5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/Kota	12	12	100,00						
		5.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/Kota	1	0	0,00						
		5.6	Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Desa	839	1863	222,05						
		5.7	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	1	100,00						

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021			KEUANGAN			SDM (OH)			
				TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	
		5.8	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	8	3	37,50						
		5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan asset desa secara memadai	Desa	5	8	160,00						
					Capaian Rata-Rata		100,32	1.190.439.000,00	1.190.570.826,00	100,01	3791	3254	85,83
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	87,03	116,04						
		6.2	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95,00	96,96	102,06						
		6.3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen	95,00	100,00	105,26						
		6.4	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80,00	89,36	111,70						
		6.5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	80,00	81,56	101,95						
		6.6	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00						
		6.7	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00						
		6.8	Persentase penyelesaian RTP	Persen	100,00	100,00	100,00						
		6.9	Persentase efektivitas pengendalian intern	Persen	65,00	100,00	153,85						
		6.10	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	92,00	122,67						
					Capaian Rata-Rata		111,35	21.188.572.000	21.146.257.038	99,80	6.636	6.636	100,00
			Total					24.340.652.000	24.275.594.061	99,73	19.774	19.260	97,40

PERBANDINGAN REALISASI OUTCOME

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KINERJA IKK									
			SATUAN	REALISASI 2021	REALISASI 2020	NAIK (TURUN)	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2020	NAIK (TURUN)	TARGET 2024	% REALISASI THD TARGET 2024	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1,1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	73.754	160	73.594	14.238,22	148,11	14.090	453	16.281
		1,2	Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi	Rp (Juta)	970.031	691	969.340	112.402,20	319,69	112.083	755	128.481
		1,3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	388.191	4.535	383.656	208,09	403,83	(195,74)	112.930	343,74
		1,4	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp (Juta)	25.377	11.665	13.712	1.626,73	43,01	1.583,72	52.169	48,64
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2,1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1	0	1	NA	0	NA	0	NA
		2,2	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang diawasi	PSN	4	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3,1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11	9	2	110,00	90,00	20,00	12	91,66
		3,2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	1	0	100,00	50,00	50,00	2	50
		3,3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	47	0	47	188,00	0,00	188,00	53	88,68
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4,1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	0	100,00	100,00	-	100	100
		4,2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	0	133,33	142,86	(9,52)	90	83,33
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Prov	1	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA
		5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/Kota	5	NA	NA	83,33	NA	NA	NA	NA
			Jumlah Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Pemda	6	6	0	85,71	100	(14,29)	13	46,15
		5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Prov	1	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA
		5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/Kota	12	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA
			Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Pemda	13	13	0	100	100	0	14	92,86
		5.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/Kota	0	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
		5.6	Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Desa	1863	40%	NA	222,05	100	125,05	60%	NA
		5.7	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	0	1	100,00	0,00	100,00	6	16,67
		5.8	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	3	0,55%	NA	37,50	100	(62,50)	2,58%	NA
	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	%	0,55	0,55	0	37,5	100	(62,5)	2,58	21,32		
5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan asset desa secara memadai	Desa	8	0	8	160,00	0	160,00	418	1,91		
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	87,03	80,48	6,55	116,04	107,31	8,73	79,00	110,16
		6.2	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	96,96	84,34	12,62	102,06	98,07	3,99	90,00	108
		6.3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen	100,00	100,00	-	105,26	100,00	5,26	100,00	100
		6.4	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	89,36	Baik	NA	111,70	NA	NA	Baik	NA
			Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	89,36	85	4,36	111,70	100	11,70	85	111,70
6.5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	81,56	83,64	(2,08)	101,95	104,55	(2,60)	84,00	97,10		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KINERJA IKK								
			SATUAN	REALISASI 2021	REALISASI 2020	NAIK (TURUN)	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2020	NAIK (TURUN)	TARGET 2024	% REALISASI THD TARGET 2024
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		6.6 Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persen	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
		6.7 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100
		6.8 Persentase penyelesaian RTP	Persen	100,00	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA
		6.9 Persentase efektivitas pengendalian intern	Persen	100,00	NA	NA	153,85	NA	NA	NA	NA
		6.10 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	92,00	90,65	1,35	122,67	129,50	(6,83)	81,00	100

TARGET DAN REALISASI RINCIAN OUTPUT

SASARAN KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	KINERJA RO				ANGGARAN			SDM			EFISIENSI DANA	EFISIENSI SDM
			SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	TARGET (OH)	REALISASI (OH)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perencanaan dan Kemaritiman	Laporan	23	24	104,35	300.380.000	299.950.801	99,86	2689	2418	89,92	Efisien	Efisien
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perencanaan dan Kemaritiman	Laporan	15	18	120,00	197.900.000	197.528.178	99,81	763	899	117,82	Efisien	Efisien
Jumlah SK 1				38	42	110,53	498.280.000	497.478.979	99,84	3452	3317	96,09		
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK	Laporan	8	8	100,00	150.276.000	148.992.000	99,15	463	345	74,51	Efisien	Efisien
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK	Laporan	21	22	104,76	207.662.000	206.240.434	99,32	1283	1312	102,26	Efisien	Efisien
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK	Laporan	5	6	120,00	54.197.000	53.845.000	99,35	467	336	71,95	Efisien	Efisien
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional	Laporan	7	8	114,29	177.615.000	177.059.100	99,69	818	800	97,80	Efisien	Efisien
Jumlah SK 2				41	44	107,32	589.750.000	586.136.534	99,39	3.031	2.793	92,15		
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang AN	Laporan	22	23	104,55	297.545.000	291.779.139	98,06	1257	1074	85,44	Efisien	Efisien
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha Pembangunan Bidang AN	Laporan	7	7	100,00	148.680.000	146.458.398	98,51	326	267	81,90	Efisien	Efisien
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang AN	Laporan	2	2	100,00	31.347.000	31.275.000	99,77	181	135	74,59	Efisien	Efisien
Jumlah SK 3				31	32	103,23	477.572.000	469.512.537	98,31	1.764	1.476	83,67		
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi	Laporan	19	22	115,79	261.719.000	254.408.947	97,21	679	1393	205,15	Efisien	Tidak Efisien
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi Bidang Investigasi	Laporan	11	11	100,00	134.320.000	131.229.200	97,70	421	391	92,87	Efisien	Efisien
Jumlah SK 4				30	33	110,00	396.039.000	385.638.147	97,37	1100	1784	162,18		
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang PKD	Laporan	23	23	100,00	611.333.000	609.033.926	99,62	1841	1305	70,89	Efisien	Efisien
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang PKD	Laporan	12	12	100,00	268.799.000	268.551.050	99,91	920	915	99,46	Efisien	Efisien
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang PKD	Laporan	16	16	100,00	255.125.000	258.630.350	101,37	743	753	101,35	Tidak Efisien	Tidak Efisien
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA	Laporan	2	2	100,00	12.000.000	11.670.000	97,25	134	134	100,00	Efisien	Efisien

SASARAN KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	KINERJA RO				ANGGARAN			SDM			EFISIENSI DANA	EFISIENSI SDM
			SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	TARGET (OH)	REALISASI (OH)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan Kapabilitas APIP	Laporan	3	3	100,00	43.182.000	42.685.500	98,85	153	147	96,08	Efisien	Efisien
		Jumlah SK 5		56	56	100,00	1.190.439.000	1.190.570.826	100,01	3.791	3.254	85,83		
6	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel, dan Sehat	100,00	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00	19.582.804.000	19.543.556.434	99,80				
			Layanan dukungan manajemen	Layanan	1	1	100,00	475.268.000	472.543.204	99,43				
			Layanan Sarana	Unit	187	187	100,00	301.500.000	301.159.400					
			Layanan Prasarana	Unit	205	205	100,00	829.000.000	828.998.000	100,00				
		Jumlah SK 6		394	394	100,00	21.188.572.000	21.146.257.038	99,80	6636	6.636	100,00	Efisien	Efisien
		Total					24.340.652.000	24.275.594.061	99,73	19.774	19.260	97,40		

PERBANDINGAN REALISASI RINCIAN OUTPUT

Sasaran Kegiatan	RINCIAN OUTPUT (RO)	Satuan	Kinerja RO						
			Realisasi 2021 (Lap/bln)	Realisasi 2020 (Lap/bln)	Naik (Turun) Realisasi	% Capaian 2021	% Capaian 2020	Naik (Turun) Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	Laporan	24	N/A	-	104,35	N/A	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	Laporan	18	N/A	-	120,00	N/A	-
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK	Laporan	8	N/A	-	100,00	N/A	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK	Laporan	22	N/A	-	104,76	N/A	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK	Laporan	6	N/A	-	120,00	N/A	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional	Laporan	8	N/A	-	114,29	N/A	-
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang AN	Laporan	23	N/A	-	104,55	N/A	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha Pembangunan Bidang AN	Laporan	7	N/A	-	100,00	N/A	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang AN	Laporan	2	N/A	-	100,00	N/A	-
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi	Laporan	22	N/A	-	115,79	N/A	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi Bidang Investigasi	Laporan	11	N/A	-	100,00	N/A	-
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang PKD	Laporan	23	N/A	-	100,00	N/A	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang PKD	Laporan	12	N/A	-	100,00	N/A	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang PKD	Laporan	16	N/A	-	100,00	N/A	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA	Laporan	2	N/A	-	100,00	N/A	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan Kapabilitas APIP	Laporan	3	N/A	-	100,00	N/A	-
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Layanan Perkantoran	Layanan	1	N/A	-	100,00	N/A	-
		Layanan dukungan manajemen	Layanan	1	N/A	-	100,00	N/A	-
		Layanan Sarana	Unit	187	N/A	-	100,00	N/A	-
		Layanan Prasarana	Unit	205	N/A	-	100,00	N/A	-

PROYEK STRATEGIS NASIONAL

NO.	PSN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1	Bendungan Tapin	telah dimanfaatkan sebagai penyediaan air irigasi dan pengendali banjir di wilayah Kabupaten Tapin, namun belum untuk pemanfaatan lainnya berupa objek wisata masih menunggu Sertifikasi Operasi dan Pemeliharaan dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Proses penerbitan Sertifikasi Operasi dan Pemeliharaan dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar dipercepat supaya pemanfaatan untuk objek wisata dapat direalisasikan dan dibahas dengan Bupati Tapin

BADAN USAHA DENGAN KINERJA BAIK

NO	NAMA BUMD	EVALUASI KINERJA KEMENPUPR		EVALUASI KINERJA KEMENDAGRI	MR
		SKOR	TINGKAT KESEHATAN		
1	PDAM Bandarmasih	3.62	Sehat	71,13	30,24
2	PDAM Kabupaten Tapin	3.32	Sehat	55,46	-
3	PDAM Kabupaten Tanah Laut	3.22	Sehat	55,90	-
4	PDAM Kabupaten Balangan	3.18	Sehat	61,90	-
5	PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.14	Sehat	65,70	-
6	PDAM Kabupaten Tabalong	3.13	Sehat	58,56	-
7	PDAM Intan Banjar	3.10	Sehat	61,51	-
8	PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara	2.98	Sehat	59,20	-
9	PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu	2.98	Sehat	58,80	-
10	PDAM Kabupaten Barito Kuala	2.88	Sehat	58,30	-
11	PDAM Kabupaten Kotabaru	2.88	Sehat	58,35	-

TINGKAT MATURITAS SPIP, KAPABILITAS APIP, MRI, DAN IEPK PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA PEMDA	SPIP			APIP			MRI		IEPK
		SKOR	LEVEL	PREDIKAT	LEVEL	PREDIKAT	LEVEL	PREDIKAT		
1	Provinsi Kalimantan Selatan	3,0375	3	Terdefinisi	3	Terintegrasi	2	Repeatable	belum ada penilaian	
2	Kota Banjarmasin	3,0807	3	Terdefinisi	3	Terintegrasi	2	Repeatable	belum ada penilaian	
3	Kota Banjarbaru	3,0602	3	Terdefinisi	2	Terstruktur	2	Repeatable	belum ada penilaian	
4	Kabupaten Banjar	3,0057	3	Terdefinisi	3	Terintegrasi	2	Repeatable	belum ada penilaian	
5	Kabupaten Batola	3,0000	3	Terdefinisi	2 Plus	Terstruktur	2	Repeatable	belum ada penilaian	
6	Kabupaten Tanah Laut	3,1205	3	Terdefinisi	3	Terintegrasi	2	Repeatable	belum ada penilaian	
7	Kabupaten Tanah Bumbu	3,0830	3	Terdefinisi	2 Plus	Terstruktur	2	Repeatable	belum ada penilaian	
8	Kabupaten Kotabaru	3,0602	3	Terdefinisi	2 Plus	Terstruktur	2	Repeatable	belum ada penilaian	
9	Kabupaten Tapin	3,0375	3	Terdefinisi	2	Terstruktur	2	Repeatable	belum ada penilaian	
10	Kabupaten HSS	3,0830	3	Terdefinisi	3	Terintegrasi	2	Repeatable	belum ada penilaian	
11	Kabupaten HST	-	2	Berkembang	2	Terstruktur	2	Repeatable	belum ada penilaian	
12	Kabupaten HSU	3,0602	3	Terdefinisi	2 Plus	Terstruktur	2	Repeatable	belum ada penilaian	
13	Kabupaten Balangan	3,0227	3	Terdefinisi	3	Terintegrasi	2	Repeatable	belum ada penilaian	
14	Kabupaten Tabalong	3,0375	3	Terdefinisi	2	Terstruktur	2	Repeatable	belum ada penilaian	